

**PENGARUH LEVERAGE, UKURAN LEGISLATIF,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, UKURAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP
RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI
KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA
TAHUN 2016-2018**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi**

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun Oleh:

Xina Fidellisa Tolongan

NPM : 160422885

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

Skripsi

**PENGARUH LEVERAGE, UKURAN LEGISLATIF,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, UKURAN
PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK
TERHADAP RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI
KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA
TAHUN 2016-2018**



Disusun Oleh:

XINA FIDELLISA TOLONGAN

NPM: 16 04 22885

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Heni Kurniawan", is placed below the "Pembimbing" label.

Ch. Heni Kurniawan, S.E., M.Si.

21 Oktober 2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 789/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Senin, 5 Oktober 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. | Ketua Penguji |
| 2. Dr. Nuritomo, SE., M.Acc. | Anggota |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | Anggota |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Xina Fidellisa Tolongan
NPM : 160422885

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Xina Fidellisa Tolongan telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji. Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**"PENGARUH LEVERAGE, UKURAN LEGISLATIF,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, UKURAN PEMERINTAH DAERAH
DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP
RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI
KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2016-2018"**

Merupakan hasil karya sendiri. Baik pernyataan, ide maupun kutipan secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain, dinyatakan secara tertulis di skripsi ini dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Xina Fidellisa Tolongan

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN,

yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”.

YEREMIA 29:11

Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata,
akan menuai dengan bersorak-sorai.

MAZMUR 126:5

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN,
yang menaruh harapannya pada Tuhan.

YEREMIA 17:7

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan penyertaanNya yang begitu melimpah, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016-2018”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kebaikan, kekuatan, dan kasihNya yang selalu dilimpahkan tiap hari kepada penulis selama proses kuliah sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Semuanya itu diberikan melalui firmanNya di Alkitab, melalui orang-orang disekitar penulis yang memberikan kekuatan.
2. Bapak Ch. Heni Kurniawan, S.E., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan koreksi serta masukan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Ign. Novianto Hariwivowo, SE., M.Acc., seagai dosen pembimbing akademik yang telah membantu selama perkuliahan, memberikan dukungan dan saran selama perkuliahan. Ibu MG. Fitria Harjanti, SE,MSc., sebagai dosen yang selalu membantu, mendukung selama perkuliahan dan memberikan kesempatan untuk menjadi asisten dosen selama 1 tahun di UAJY. Bapak Nuritomo, SE., M.Sc., yang memberikan kata-kata motivasi serta dukungan kepada penulis dan menjadi salah panutan penulis untuk memulai lembar yang baru didunia kerja.
4. Kedua orang tua penulis Bapak Y. Robinson Tolongan dan Ibu Erni Menggo serta saudara terkasih Jan Felix Tolongan dan Afiat Flegon Tolongan yang tiada hentinya mendoakan , memberi semangat, menasihati, membantu dan menjadi motivasi penulis dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat –sahabat penulis Febrianti, Trifena, Datu, Azaria, Vemytha, Gaby, Nia, Liani, Novia, Firda, Okto.
6. Sahabat-sahabat penulis di kampus Agatha, Putri, Stella, Agita dan teman-teman akuntansi 16 lainnya yang selalu memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. RM, JIN, SUGA, J-HOPE, JIMIN, V, JUNGKOOK. BTS (Bangtan Sonyeondan) yang menjadi idola penulis. Karya-karya BTS yang menemani dan menjadi kekuatan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Khususnya lagu, kata-kata motivasi member BTS dan video-video BTS yang menjadi kekuatan ketika penat.

8. Saudara dan sahabat terkasih JOY FELLOWSHIP INDONESIA dan KMT UAJY yang selalu mendoakan, dan mendengar keluh kesah dan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Kak Alvin, Kak Roby dan Kak Geti seta teman-teman anak bimbingan Pak Iwan yaitu Veny, Aprilia, Iga, Vera, Archita yang selalu memberi bantuan dan semangat dalam pengerjaan skripsi.
10. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis pun menyadari setiap keterbatasan kemampuan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Terima Kasih.

Yogyakarta, 16 September 2020

Penulis

Xina Fidellisa Tolongan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teori.....	10
1.4.2. Manfaat Praktik.....	10
BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	11
2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.3. Leverage	16
2.4. Ukuran Legislatif.....	19
2.5. Intergovernmental Revenue	20
2.6. Ukuran Pemerintah Daerah	21

2.7.	Hasil Pemeriksaan Audit BPK	22
2.7.1.	Temuan Audit	23
2.7.2.	Opini Audit	23
2.8.	Kerangka Konseptual	25
2.8.1.	Agency Theory (Teori Keagenan)	25
2.8.2.	Hubungan Leverage terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	26
2.8.3.	Hubungan Ukuran Legislatif terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	27
2.8.4.	Hubungan Intergovernmental Revenue terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	28
2.8.5.	Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	29
2.8.6.	Hubungan Temuan Audit terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	30
2.8.7.	Hubungan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	31
2.9.	Penelitian Terdahulu	31
2.10.	Pengembangan Hipotesis	35
2.7.1.	Pengaruh Leverage terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	35
2.7.2.	Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	37
2.10.3.	Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	38
2.10.4.	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	39
2.10.5.	Pengaruh Temuan Audit terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	40

2.10.6. Pengaruh Opini Audit terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian	43
3.3. Populasi Penelitian	43
3.4. Sampel Penelitian.....	44
3.5. Variabel Penelitian	44
3.6. Operasionalisasi Variabel.....	45
3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	48
3.7.1. Jenis Data.....	48
3.7.2. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.8. Analisis Data	49
3.8.1. Uji Asumsi Klasik.....	49
3.8.1.1. Uji Asumsi Normalitas	49
3.8.1.2. Uji Asumsi Multiolinearitas.....	49
3.8.1.3. Uji Asumsi Heterokedastisitas	50
3.8.1.4. Uji Asumsi Autokorelasi.....	51
3.8.2. Analisis Statistik Deskriptif	51
3.9. Uji Hipotesis.....	52
3.9.1. Hipotesis Statistika.....	52
3.9.2. Tingkat Kesalahan	54
3.9.3. Model Pengujian Statistik	55
3.9.4. Teknik Pengujian	56
3.9.4.1. Uji Nilai t	56
3.9.4.2. Uji Nilai F	57
3.9.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	57
3.10. Rencana Pembahasan	59

BAB IV <u>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</u>	59
4.1 Sampel Penelitian.....	59
4.2. Statistik Deskriptif.....	59
4.3. Uji Asumsi Klasik	62
4.3.1. Uji Normalitas.....	62
4.3.2. Uji Multikolinearitas	64
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.3.4. Uji Autokorelasi.....	69
4.4. Pengujian Hipotesis.....	71
4.5. Pengujian Statistik.....	75
4.5.1. Uji Nilai t	75
4.5.2. Uji Nilai F.....	77
4.5.3. Koefisien Determinasi	78
4.6. Hasil dan Pembahasan.....	80
4.6.1. Pengaruh Leverage terhadap Rasio Efektivitas	80
4.6.2. Pengaruh Leverage terhadap Rasio Efisiensi.....	80
4.6.3. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Rasio Efektivitas.....	82
4.6.4. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Rasio Efisiensi	83
4.6.5. Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Rasio Efektivitas	84
4.6.6. Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Rasio Efisiensi.....	85
4.6.7. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Rasio Efektivitas	86
4.6.8. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Rasio Efisiensi.....	86
4.6.9. Pengaruh Temuan Audit terhadap Rasio Efektivitas	88
4.6.10. Pengaruh Temuan Audit terhadap Rasio Efisiensi.....	88
4.6.11. Pengaruh Opini Audit terhadap Rasio Efektivitas	89
4.6.12. Pengaruh Opini Audit terhadap Rasio Efisiensi.....	90
BAB V <u>KESIMPULAN DAN SARAN</u>	91

5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Keterbatasan.....	94
5.3. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95



DAFTAR TABEL

2.1.	Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja.....	16
2.2.	Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja.....	17
2.3.	Penelitian Terdahulu	33
3.1.	Operasional Variabel.....	45
4.1.	Sampel Penelitian.....	59
4.2.	Statistik Deskriptif.....	60
4.3.	Hasil Uji Normalitas Y1.....	63
4.4.	Hasil Uji Normalitas Y2.....	64
4.5.	Hasil Uji Multikoneraritas	65
4.6.	Hasil Uji Heterokedasitas Y1	66
4.7.	Hasil Uji Heterokedasitas Y2.....	67
4.8.	Hasil Uji Autokorelasi Y1	69
4.9.	Hasil Uji Autokorelasi Y2.....	70
4.10.	Hasil Pengujian Hipotesis Y1	71
4.11.	Hasil Pengujian Hipotesis Y2	73
4.12.	Hasil Uji Nilai t Y1	75
4.13.	Hasil Uji Nilai t Y2	76
4.14.	Hasil Uji Nilai F Y1	77
4.15.	Hasil Uji Nilai F Y2	77
4.16.	Hasil Uji Koefisien Determinasi Y1	78
4.17.	Hasil Uji Koefisien Determinasi Y2	79

DAFTAR GAMBAR

- 3.1. Pengujian Satu Sisi Hipotesis berarah positif54
- 3.2. Pengujian Satu Sisi Hipotesis berarah negatif.....55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Analisis Data
Lampiran II	Uji Statistik Deskriptif
Lampiran III	Uji Normalitas
Lampiran IV	Uji Multikolinearitas
Lampiran V	Uji Heterokedastisitas
Lampiran VI	Uji Autokorelasi
Lampiran VII	Uji Regresi



**PENGARUH LEVERAGE, UKURAN LEGISLATIF,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN
HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP
RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI KABUPATEN/KOTA
DI PULAU JAWA TAHUN 2016-2018**

**Xina Fidellisa Tolongan
Ch. Heni Kurniawan**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43 – 44, Yogyakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap rasio efektivitas dan rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, temuan audit BPK, dan opini audit BPK. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data arsip sekunder yang diperoleh dari website DJPK Menkeu, website BPK RI dan website pemerintah daerah terkait. Penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak 126 data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara regresi linier berganda dengan program IBM SPSS 17.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas pada alfa 10%. *Leverage*, dan temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap rasio efektivitas. *Leverage*, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap rasio efisiensi. Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap rasio efisiensi. Ukuran Legislatif dan opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap rasio efektivitas. Ukuran Legislatif dan opini audit BPK tidak berpengaruh dan rasio efisiensi.

Kata Kunci : *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK, Opini Audit BPK, , Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.4. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pengalihan kewenangan ini ialah agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya untuk membiayai pembangunan di daerah dan pelayanan publik.

Adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Sasongko, 2009). Selain itu efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan merupakan hal yang penting dalam otonomi daerah (Bisma, 2010). Sehingga, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan baik dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabilas dalam pengelolaan

keuangan pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan (Sularmi & Agus Endro, 2006).

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah setiap tahun yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum digunakan sebagai sumber informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI menuliskan bahwa LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu diadakan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah demi untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, demi terwujudnya tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Halim (2004) mendefinikan analisi kinerja keuangan sebagai usaha mengidentifikasi ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Pengkukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dan akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Menurut Halim (2004), kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan daerah. Kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas dari pemangku kekuasaan karena setiap transaksi yang terjadi harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan jujur kepada masyarakat. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2004). Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikerluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal. Menurut Mardiasmo (2013) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah *leverage*, . *Leverage* adalah perbandingan antara utang dan modal.

Menurut Fakhrudin (2008), *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Dalam akuntansi sektor publik, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai aset daerahnya.

Selain itu, ukuran legislatif juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif di pemerintah daerah yang akan berperan untuk mengontrol kebijakan keuangan secara akuntabel dan transparan. Dengan banyaknya jumlah anggota legislatif, diharapkan akan membuat kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah *Intergovernmental Revenue*. *Intergovernmental Revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Sumarjo 2010). Menurut PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dan hal ini menjadikan dana perimbangan sebagai salah satu pendapatan daerah. Pengalokasian dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya

dana perimbangan, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

Ukuran pemerintah daerah menjadi salah satu indikator lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut (Suhardjanto et al., 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), ukuran pemerintah diukur menggunakan total aset pemerintah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Dengan jumlah aset yang lebih besar diharapkan daerah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang memiliki aset yang lebih kecil (Patrick, 2007) dalam Lesmana (2010).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang nantinya akan diterbitkan kepada publik. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan di audit oleh BPK untuk memastikan apakah LKPD telah disusun secara wajar dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sehingga pelaksanaan audit sangat penting dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan terkait kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh

Sumarjo (2010) dengan hasil penelitian menghasilkan ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ukuran legislatif dan kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Minarsih (2015), menyatakan bahwa *size*, *wealth*, *leverage* dan *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Jawa Tengah secara parsial untuk rasio efisiensi. Sedangkan untuk rasio efektivitas, variabel *leverage* berpengaruh negatif dan *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian lain yang dilakukan Sesotyaningtyas (2012), menyatakan bahwa secara parsial, variabel *leverage*, ukuran legislatif dan *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja, sedangkan variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Selain penelitian itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013), menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Selain penelitian terdahulu diatas terdapat juga penelitian oleh Kusumawardani (2012) yang menyimpulkan secara parsial

menunjukkan bahwa variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dan hasil yang berbeda-beda dari berbagai penelitian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, Ukuran Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2016-2018**. Peneliti mengambil obyek Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan penerima DAU terbesar pada tahun 2019 diantaranya ialah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (www.djpk.kemenkeu.go.id), tetapi beberapa daerah masih menyalahgunakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat. Di Jawa Timur, mendapat sorotan dari DPD RI karena tata kelola keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur memburuk dilihat dari peningkatan jumlah daerah yang mendapat penilaian dari BPK wajar dengan pengecualian (<https://surabaya.bpk.go.id>). Sementara di Jawa Barat, walaupun LKPD tahun anggaran 2018 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun tata kelola keuangan masih ada persoalan diantaranya ialah permasalahan terkait dengan pengelolaan kas (<https://tagar.id>). Seperti yang dimuat dalam <https://nasional.kontan.co.id> bahwa alokasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) semakin bertambah dari tahun ke tahun tetapi belum adanya kepatuhan daerah dalam membelanjakan dana tersebut untuk pelayanan publik.

Bahkan 70% alokasi dana dari total APBD digunakan untuk menanggung urusan pegawai ketimbang diperuntukkan bagi masyarakat dan infrastruktur. Menteri keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa sekitar 13,4% dana APBD ternyata digunakan untuk perjalanan dinas dan 17,5% untuk jasa kantor. DKI Jakarta merupakan provinsi yang menempati posisi pertama dengan anggaran belanja pegawai mencapai 66,4% pada tahun 2017 (<https://tirto.id>). Pada 8 November 2019 dimuat dalam <https://lenterasutera.com>, Agus Rahardjo selaku mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) membeberkan daftar provinsi yang mempunyai kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2004-2019, dan Jawa Timur berada di posisi teratas dengan 85 kasus diikuti dengan beberapa daerah lainnya diantaranya Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kendala pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan motivasi yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap rasio efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
3. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap rasio efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?

4. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
5. Apakah *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap rasio efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
6. Apakah *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
7. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap rasio efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
8. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
9. Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap rasio efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
10. Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
11. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap rasio efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?
12. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *Intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap rasio efektivitas dan

rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dengan periode yang berbeda yaitu tahun 2016-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teori

Memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara *leverage*, ukuran legislatif, *Intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian bagaimana pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *Intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

1.4.2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah terkait sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada periode selanjutnya.

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa peranan laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Adanya laporan keuangan dapat membantu untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan dan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Melalui LKPD maka dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi publik.

Pemerintah daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disusun merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas penggunaan APBD sehingga melalui LKPD maka pengguna dapat mengetahui mengenai kondisi dan kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut SAP Berbasis Akrua, informasi akuntansi dalam LKPD mempunyai karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan

adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi dilaporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu untuk mengevaluasi masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan dan mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan penggunaannya. Artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunaannya.

Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. PP No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Menurut Halim (2004), kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan daerah. Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013) dalam jurnalnya, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Whinttaker (dalam BPKP,2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja sangat penting dalam suatu organisasi khususnya pemerintah daerah untuk menilai akuntabilitas dan transparansi organisasi dalam menjalankan pelayanan publik agar menghasilkan pelayanan yang baik. Di samping itu kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik saat ini sudah meningkat sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan manfaat atas pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Melalui pengukuran kinerja maka pemerintah dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012).

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD ialah:

1. Rasio Efektivitas

Menurut KBBI, efektif berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Halim (2012), menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 2.1.

Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Pengukuran Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60%- 80%	Kurang Efektif

Dibawah 60%	Tidak Efektif
-------------	---------------

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal.

Menurut Mardiasmo (2013) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 2.2.

Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Pengukuran Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.3. Leverage

APBD merupakan dana yang digunakan untuk pembangunan daerah dan menjalankan aktivitas pemerintah daerah, namun adakalanya pendapatan daerah tidak mampu untuk menutupi belanja daerah sehingga terjadi defisit anggaran. Oleh

karena itu, pemerintah daerah memerlukan bantuan sumber dana untuk menutupi defisit tersebut.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, utang daerah atau pinjaman daerah dapat bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/ atau penerusan Pinjaman Luar Negeri.
2. Pemerintah Daerah Lain.
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah NKRI.
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu Lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah NKRI.
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Di dalam sektor swasta, istilah *leverage* lebih sering digunakan. Fakhruddin (2008) mengatakan bahwa *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi sektor publik, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai aset daerahnya.

Leverage menunjukkan proporsi pendanaan daerah yang dibiayai dengan hutang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) menyatakan bahwa semakin besar *leverage* suatu pemerintah daerah maka kinerja keuangan yang

dimiliki oleh daerah tersebut baik. Pemerintah pusat sebagai kreditor akan tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan aktivitasnya. Dengan adanya pengawasan ini maka akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat meyakinkan pemerintah pusat bahwa dana yang dipinjamnya dapat dibayarkan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* dalam mengukur *leverage*. Rumusan untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut (Kasmir, 2014):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

2.4. Ukuran Legislatif

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, lembaga legislatif atau biasa dikenal dengan istilah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif di pemerintah daerah yang akan berperan untuk mengontrol kebijakan keuangan secara akuntabel dan transparan. Peran DPRD dalam pemerintah daerah sangat besar karena bertugas mengawasi pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran yang ada dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dengan baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja.

DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan fungsi yang strategis berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah (Sumarjo 2010), didalam PP No.

58 Tahun 2005 Pasal 132 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa DPRD memberikan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan daerah berkaitan dengan APBD. Pengawasan ini dilakukan oleh fraksi-fraksi, komisi-komisi serta alat kelengkapan lainnya yang dibuat dalam peraturan tata tertib DPRD. Pada penelitian ini ukuran legislatif akan diukur dengan melihat banyaknya jumlah anggota legislatif atau anggota DPRD, seperti yang dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), yang mana datanya dapat diperoleh dari website pemerintah terkait.

2.5. Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah (Patrick, 2007). Pemerintah daerah akan menggunakan itu sesuai alokasi dan petunjuk anggaran dan menurut undang-undang. *Intergovernmental Revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan di Indonesia (Sumarjo, 2010). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mendanai dan menjalankan aktivitas

daerah sehingga pemerintah daerah dapat menghasilkan kinerja yang baik. Dana perimbangan dapat dilihat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena LRA menyajikan informasi terkait anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode (PP No. 8 Tahun 2006). Dana Perimbangan dapat dihitung menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Halim 2012).

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.6. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut (Suhardjanto et al., 2010), yang salah satunya dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Sumajo (2010). Pemerintah daerah harus didukung oleh aktiva/aset yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Ukuran pemerintah diukur menggunakan total aset pemerintah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (PP No. 71 Tahun 2010).

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Daerah yang memiliki ukuran daerah yang besar memiliki tuntutan yang besar pula

karena dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik. Dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) dan Marfiana dan Kurniasih (2013) yaitu ukuran pemerintah daerah diprosikan dengan total aset.

2.7. Hasil Pemeriksaan Audit BPK

Menurut Rai (2008), audit sektor publik adalah:

“Audit sektor publik merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada entitas yang menyediakan pelayanan dan pengadaan barang yang pembiayaannya bersumber dari penerimaan pajak serta penerimaan dari Negara yang lain yang bertujuan untuk membandingkan antara kriteria yang telah ditetapkan dengan situasi yang ditemukan.”

Tujuan dari audit sektor publik diatur didalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berguna untuk menjunjung keberhasilan dari cara pengaturan keuangan Negara dengan taat dan tertib pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Laporan keuangan yang telah disusun dan siap untuk diterbitkan kepada publik akan diaudit oleh BPK untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dibuat.

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

2.7.1. Temuan Audit

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa salah satu masalah keagenan adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana adanya informasi yang tidak transparan antara agen dan prinsipal yang dapat berindikasi pelanggaran dan korupsi. Asimetri dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditelusuri dari hasil pemeriksaan BPK yang tercantum dalam temuan pemeriksaan. Temuan audit BPK merupakan permasalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah atas kelemahan pada sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan audit berpotensi merugikan keuangan negara. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Pada penelitian ini temuan audit akan diukur dengan melihat jumlah temuan audit.

2.7.2. Opini Audit

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. UU No. 15 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian Internal. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini audit diberikan auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini ini dikeluarkan oleh BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki empat (4) macam opini yang dapat dikeluarkan atau diberikan. Jenis-jenis Opini yang diberikan oleh BPK berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang sangat diharapkan bagi seluruh institusi baik itu pusat ataupun daerah serta merupakan opini yang paling tinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ketika memperoleh opini audit WTP berarti menandakan bahwa laporan keuangan yang diungkapkan sudah baik yang artinya sudah diungkapkan sewajarnya dan cukup, dalam segala hal yang material serta sangat bermanfaat untuk membuat keputusan karena tingkat kepercayaan atas laporan keuangan itu baik. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini ini dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sama halnya dengan WTP kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Lalu opini Tidak Wajar (TW) merupakan opini yang menandakan bahwa laporan keuangan yang diungkapkan tidak disajikan dengan wajar dan cukup, pada seluruh hal yang

material. Terakhir yaitu opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) yang menandakan bahwa laporan keuangan yang diungkapkan itu tidak bisa diperiksa karena tidak sesuai dengan standar pemeriksaan yang ada.

Menurut Hartono (2016), skala ordinal yaitu bernilai klasifikasi dan order (ada urutannya). Kategorinya akan disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah atau sebaliknya. Dalam penelitian ini digunakan skala ordinal dalam menyatakan variabel opini audit BPK dengan ketentuan semakin baik opini audit BPK maka semakin tinggi nilai skala ordinal, Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang digunakan oleh Marfiana dan Kurniasih (2012).

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Agency Theory (Teori Keagenan)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency theory merupakan hubungan antara prinsipal dengan agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang memberikan wewenang dan yang menerima wewenang ialah pihak agen. Dalam sektor publik, masyarakat merupakan pihak prinsipal atau pemberi wewenang dan pemerintah merupakan pihak agen atau pelaksana wewenang. Sebagai pihak principal akan memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat dan mengelola anggaran. Sebagai penerima wewenang, agen akan membuat laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal.

Agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan principal, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Hubungan antara principal dan agen dapat mengarah

pada kondisi ketidakseimbangan informasi, karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal. Kinerja pemerintah akan mendapat banyak sorotan karena masyarakat akan menuntut pelayanan publik yang seharusnya diterima masyarakat. Oleh karena itu, pelaporan kinerja dari pemerintah daerah selaku agen menjadi sebuah hal yang penting untuk menilai kinerja dari pemerintah daerah. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah daerah ialah melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periode.

2.8.2. Hubungan Leverage terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Fakhrudin (2008) mengatakan bahwa *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Dalam akuntansi sektor publik, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai aset daerahnya. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Mahmudi, 2016). *Leverage* merupakan perbandingan antara utang dan modal (Kusumardani, 2012). Sehingga dapat dikatakan *leverage* merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang karena daerah tidak mampu membiayai urusan daerahnya melalui modal sendiri.

Pemerintah pusat sebagai kreditor akan tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan aktivitasnya, karena tujuan dari pinjaman adalah sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan. Dengan adanya pengawasan ini maka akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja kinerjanya dan

mencapai tujuan telah ditetapkan. Agar dapat meyakinkan pemerintah pusat bahwa dana yang dipinjamnya dapat dibayarkan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan meningkatkan rasio efektivitas.

Dengan tingginya tingkat pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan tanpa bergantung pada APBD, yang bisa dibelanjakan untuk mendukung aktivitas lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *leverage* akan meningkatkan rasio efisiensi.

2.8.3. Hubungan Ukuran Legislatif terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Lembaga legislatif atau biasa dikenal dengan istilah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (UU No. 32 Tahun 2004). DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif di pemerintah daerah yang akan berperan untuk mengontrol kebijakan keuangan secara akuntabel dan transparan.

Peran DPRD dalam pemerintah daerah sangat besar karena mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Dengan demikian, semakin banyak jumlah anggota DPRD diharapkan akan semakin dapat meningkatkan pengawasan terhadap perealisasi anggaran yang telah direncanakan agar mencapai target.

DPRD memberikan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan daerah berkaitan dengan APBD. Peran DPRD dalam pemerintah daerah sangat besar

karena mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah anggota legislatif diharapkan mampu mengawasi pengelolaan keuangan di daerah agar dapat mengalokasikan anggaran dengan baik dan sesuai sasaran.

2.8.4. Hubungan Intergovernmental Revenue terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Intergovernmental Revenue adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah (Patrick, 2007). Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan di Indonesia (Sumarjo 2010). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005).

Dana perimbangan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mendanai dan menjalankan aktivitas daerah sehingga pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah dianggarkan. Walaupun telah dilimpah kepada pemerintah daerah, namun penggunaan dana perimbangan akan tetap dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan maka akan meningkatkan rasio efektivitas.

Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang tidak perlu dikembalikan dan tidak ada bunga yang harus dibayarkan. Dengan banyaknya dana perimbangan diharapkan pemerintah dapat merealisasikan

pendapatan daerah dengan membelanjakan dana transfer tersebut dengan bijak untuk peningkatan infrastruktur daerah. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan maka akan meningkatkan rasio efisiensi.

2.8.5. Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut (Suhardjanto et al., 2010). Pemerintah daerah harus didukung oleh aktiva/aset yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Pemerintah dengan aset besar dapat diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), ukuran pemerintah diukur menggunakan total aset pemerintah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Dengan banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas daerahnya dengan pemanfaatan aset yang dikelola dengan baik dapat membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran pendapatan yang sudah dianggarkan. Dengan demikian, semakin besar ukuran pemerintah daerah akan membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan.

Kabupaten atau Kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pengelolaan aset yang baik akan mampu untuk meningkatkan

pendapatan daerah dibandingkan dengan aset yang hanya menganggur yang hanya akan menimbulkan biaya tambahan. Dengan demikian, semakin besar ukuran pemerintah daerah akan berdampak pada upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan rasio efisiensi.

2.8.6. Hubungan Temuan Audit terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Temuan audit BPK merupakan permasalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah atas kelemahan pada sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (bpk.go.id). Temuan tersebut bisa saja satu atau lebih dari satu permasalahan. Adanya temuan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Perlu adanya monitoring hasil temuan audit, hal ini untuk memastikan apakah rekomendasi dari hasil temuan telah dilaksanakan. Yang nantinya akan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ketika hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah menemukan banyak permasalahan dapat diartikan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan anggaran yang berakibat berkurangnya belanja yang dapat digunakan untuk pemberian fasilitas kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin banyak jumlah temuan audit BPK maka akan menurunkan rasio efektivitas.

Adanya temuan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah. Banyaknya temuan audit pada LKPD menandakan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang berarti pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan baik dan tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran ini bukannya memberikan manfaat namun merugikan. Dengan demikian, banyaknya jumlah temuan audit akan menurunkan rasio efisiensi karena banyaknya penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan yang dapat merugikan.

2.8.7. Hubungan Opini Audit terhadap Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran tersebut didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern.

Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Dengan kata lain, semakin wajar opini audit BPK maka seharusnya menunjukkan semakin tingginya kinerja suatu pemerintah daerah.

2.9. Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, diantaranya Sumarjo (2010) dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ukuran Legislatif dan kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain dilakukan oleh Minarsih (2015) dengan judul “Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan Hasil penelitian menyatakan bahwa *Size*, *wealth*, *leverage* dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Jawa Tengah secara parsial untuk rasio efisiensi. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk rasio efektivitas.

Penelitian lain dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menyatakan bahwa *leverage*, ukuran legislatif dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sedangkan pendapatan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Minarsih dan Kurniasih (2012) juga melakukan penelitian terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Objek penelitian adalah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dengan tahun anggaran 2011. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Pulau Jawa. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Selain itu, Kusumawardani (2012) juga melakukan penelitian yang terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan judul “Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Penelitian ini menyatakan bahwa *size* dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.3.

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Sumarjo (2010)	Variabel Independen:	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.	1. Ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh

		<p>Ukuran Pemerintah, Kemakmuran (<i>Wealth</i>), Ukuran Legislatif, <i>Leverage</i>, <i>Intergovernmental Revenue</i>.</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>		<p>positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Ukuran Legislatif dan kemakmuran (<i>wealth</i>) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
2.	Minarsih (2015)	<p>Variabel Independen: Ukuran (<i>size</i>), Kemakmuran (<i>Wealth</i>), <i>Leverage</i>, <i>Intergovernmental Revenue</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	Kabupaten/Kota Jawa Tengah.	<p>1. <i>Size</i>, <i>wealth</i>, <i>leverage</i> dan <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Jawa Tengah untuk rasio efisiensi</p> <p>2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk rasio efektivitas.</p>
3.	Sesotyaningtyas (2012)	<p>Variabel Independen: <i>Leverage</i>, Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i>, Pendapatan Pajak Daerah.</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>		<p>1. <i>Leverage</i>, ukuran legislatif dan <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.</p> <p>2. Pendapatan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah</p>

				daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.
4.	Marfiana dan Kurniasih (2012)	<p>Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, Temuan Audit BPK, Opini Audit BPK.</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	Daerah yang ada di Pulau Jawa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Pulau Jawa. 2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.
5.	Kusumawardani (2012)	<p>Variabel Independen: <i>Size</i>, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, <i>Leverage</i>.</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Kemakmuran dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Leverage terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Fakhrudin (2008) mengatakan bahwa *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Dalam akuntansi

sektor publik, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai aset daerahnya. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Mahmudi, 2016).

Dengan adanya pengawasan ini maka akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja kerjanya dan mencapai tujuan telah ditetapkan. Agar dapat meyakinkan pemerintah pusat bahwa dana yang dipinjamnya dapat dibayarkan. Dengan tingginya tingkat pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan tanpa bergantung pada APBD, yang bisa dibelanjakan untuk mendukung aktivitas lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Minarsih (2015), Sesotyaningtyas (2012) dan Kusumawardani (2012), menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian dari Sumarjo (2010), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₁: *Leverage* berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas.

Ha₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap rasio efisiensi.

2.10.2. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

PP No. 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa DPRD memberikan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan daerah berkaitan dengan APBD. Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif di pemerintah daerah yang akan berperan untuk mengontrol kebijakan keuangan secara akuntabel dan transparan. Peran DPRD dalam pemerintah daerah sangat besar karena mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Sumarjo (2010) menyatakan bahwa DPRD bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengawasi kebijakan APBD.

Banyak jumlah anggota DPRD diharapkan akan semakin dapat meningkatkan pengawasan terhadap perealisasi anggaran yang telah direncanakan agar mencapai target. Adanya pengawasan ini juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah dianggarkan dan mengalokasikan anggaran dengan bijak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013) menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 132 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa DPRD memberikan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan daerah berkaitan dengan APBD. Diharapkan dengan besarnya jumlah anggota DPRD dapat meningkatkan pengawasan yang lebih baik terhadap pemerintah daerah

dalam menjalankan aktivitasnya. Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha3: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas

Ha4: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap rasio efisiensi.

2.10.3. Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Intergovernmental Revenue adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah (Patrick, 2007). Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan di Indonesia (Sumarjo 2010). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005).

Dana perimbangan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mendanai dan menjalankan aktivitas daerah sehingga pemerintah daerah mampu untuk merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan memanfaatkan dana transfer. Dengan adanya dana transfer dari pemerintah daerah juga yang tidak membutuhkan pengembalian lagi dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh dan Minarsih (2015) yang menunjukkan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif untuk rasio efektivitas. Penelitian Sumarjo (2010) yang menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah untuk rasio efisiensi. Berdasarkan hasil tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha5: *Intergovernmental Revenue* Daerah berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas.

Ha6: *Intergovernmental Revenue* Daerah berpengaruh positif terhadap rasio efisiensi.

2.10.4. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut (Suhardjanto et al., 2010). Total aset pemerintah daerah dijadikan tolak ukur dalam mengukur ukuran suatu daerah. Daerah yang memiliki ukuran daerah yang besar memiliki tuntutan yang besar pula karena dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik.

Pengelolaan aset yang baik akan membantu pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan aset daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset yang diolah dengan baik akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan yang tidak dikelola dengan baik karena malah akan meningkatkan biaya tambahan seperti biaya pemeliharaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) dan Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₇: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas.

Has: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap rasio efisiensi.

2.10.5. Pengaruh Temuan Audit terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan BPK selain opini juga dapat berupa catatan temuan pemeriksaan. Temuan audit BPK merupakan permasalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah atas kelamahan pada sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (bpk.go.id).

Adanya temuan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Adanya temuan ini berarti adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya ialah tidak tercapainya tujuan pemerintah daerah serta anggaran yang telah ditetapkan bisa saja tidak dialokasikan sesuai tujuannya yang mengakibatkan pada pemborosan pengeluaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₉: Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap rasio efektivitas

Ha₁₀: Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap rasio efisiensi

2.10.6. Pengaruh Opini Audit terhadap Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Menurut UU No. 15 Tahun 2004, Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran tersebut didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern. Opini audit BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2012), menyatakan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk rasio efisiensi. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, opini audit merupakan opini yang diberikan pada laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut. Ada 4 macam opini audit yang dikeluarkan oleh BPK yaitu WTP, WTP-DPP, WDP, TW, TMP. Ketika laporan keuangan pemerintah daerah itu mendapat opini WTP dapat diartikan bahwa laporan keuangan tersebut telah dibuat dengan wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kinerja dari pemerintah daerah tersebut memiliki

kinerja yang baik. Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁₁: Opini audit BPK berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas

Ha₁₂: Opini audit BPK berpengaruh positif terhadap rasio efisiensi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.6.12. Kesimpulan

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menguji konsistensi dan mengidentifikasi apakah *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, temuan audit BPK, dan opini audit BPK terhadap rasio efektivitas dan rasio efisiensi di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada alfa 10%.
8. Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada alfa 5%.
9. Hasil pengujian hipotesis kesembilan menunjukkan temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
10. Hasil pengujian hipotesis kesepuluh menunjukkan temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
11. Hasil pengujian hipotesis kesebelas menunjukkan opini Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
12. Hasil pengujian hipotesis keduabelas menunjukkan opini Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang menjadi sampel dalam penelitian ini masuk dalam kategori sangat efektif untuk rasio efektivitas. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas ada pada tingkat yang sangat efektif. Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

yang menjadi sampel dalam penelitian ini dianggap sudah mampu dalam merealisasikan pendapatan asli daerah melebihi dari target yang telah ditentukan. Untuk rasio efisiensi, Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini masuk dalam kategori kurang efisien. Dapat dilihat dari rata-rata tingkat efisiensi ada pada tingkat kurang efisien. Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang menjadi sampel dalam penelitian ini dianggap belum bisa mengefisienkan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini kebanyakan pengeluaran daerah didominasi digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal sehingga tidak dapat mempercepat pembangunan daerah karena belanja pegawai yang lebih tinggi.

Dari hasil analisis data, Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bonjonegoro merupakan kabupaten yang memiliki tingkat rasio efektivitas yang sangat efektif dan tingkat rasio efisiensi yang sangat efisien. Hal ini berarti kinerja keuangan dari Kabupaten Bonojegoro menunjukkan kinerja yang baik karena telah mampu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan mampu untuk mengalokasikan belanja daerah dengan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah. Lain halnya dengan Kabupaten Purwakarta yang memiliki tingkat rasio efektivitas yang tidak efektif dan tingkat rasio efisiensi yang kurang efisien. Hal ini berarti kinerja keuangan dari Kabupaten Purwakarta belum dapat memaksimalkan kinerjanya karena belum mampu untuk merealisasikan target yang telah di tentukan serta belum mampu untuk meminimalisir belanja daerah.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan dua rasio yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan proksi lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan, karena rasio-rasio tersebut digunakan juga untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* [Online]. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> . Diakses pada 3 Juli 2020.
- _____. Badan Pemeriksa Keuangan. Tersedia di: <https://bpk.go.id/> . Diakses pada 31 Juli 2020.
- Agustina, O. (2013). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Thesis: Universitas Sebelas Maret.
- Ardiyos. (2007). *Kamus Standar Akuntansi*. Cerakan kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Avianti, I. (2000). *Model Prediksi Kepailitan di Bursa Efek Jakarta dengan Menggunakan Indikator-Indikator Keuangan*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Bisma, I.G. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal GaneC Swara Edisi Khusus, Vol. 04*.
- CNNIndonesia.com. (2020). *184 Anggota DPRD Korupsi, KPK Ingatkan Kepercayaan Rakyat*. Diakses pada 24 Juli 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623205131-12-516681/184-anggota-dprd-korupsi-kpk-ingatkan-kepercayaan-rakyat>
- Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJPN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/Identifikasi-Masalah-Aset-Berdasar-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019. Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2019. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DAU.pdf>.
- Fakhrudin, H.M. (2008). *Istilah Pasar Modal A-Z*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi 5)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi 3)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kompasiana.com. (2016). *Pengaruh Uji Materialitas Terhadap Pendapat Auditor*. . Diakses pada 31 Mei 2016, dari <https://www.kompasiana.com/1520310090/574c45f6c9afbd11095fcfd6/pengaruh-uji-materialitas-terhadap-pendapat-auditor#>
- Kusumawardani, M. (2012). *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Lenterasultra.com. (2019). *Diganjar WTP, Keuangan Jabar Masih Sisakan Masalah*. Diakses pada 8 November 2019, dari <https://lenterasultra.com/web/2019/11/berikut-deretan-provinsi-paling-korup-versi-kpk/>.

- Lesmana, S.I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Thesis: Universitas Sebelas Maret.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., Purwanugraha, H.A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marfiana, M., dan Kurniasih, L. (2010). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret.
- Minarsih, R.A. (2015). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Nasional.kontan.co.id. (2019). *Daerah tidak patuhi mandatory spending, ini sanksinya*. Diakses pada 17 Juni 2019, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/daerah-tidak-patuhi-mandatory-spending-ini-sanksinya>.
- Noviyanti, N.A., dan Kiswanto (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Nugroho, T.R. (2018). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* Vol. 7.
- Patrick, P.A. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States–Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*. (Publication No. AAT 3266180)

- Rai, I.G.A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. (2004). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- _____. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- _____. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rukmana, W.V. (2013). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Skripsi: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sasongko, F.A. (2019). *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sesotyaningtyas, M. (2012). *Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Suhardjanto, D., Hartoko, S., Retnoningsih, H., Rusmin, M., Putriesti and Brown, A. (2010). Influence of Parliamentary Characteristics on Indonesia's Mandatory Accounting Disclosure Compliance. *Accounting Forum (China)*.

- Sularmi, dan Endro A. (2006). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan, Vol. 5*.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Indonesia*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret.
- Surabaya.bpk.go.id. (2019). *Tata Kelola Keuangan Pemerintah di Jatim Memburuk*. Diakses pada 29 Oktober 2019, dari <https://surabaya.bpk.go.id/tata-kelola-keuangan-pemerintah-daerah-di-jatim-memburuk/>.
- Tagar.id. (2019). *Diganjar WTP, Keuangan Jabar Masih Sisakan Masalah*. Diakses pada 28 Mei 2019, dari <https://www.tagar.id/diganjar-wtp-keuangan-jabar-masih-sisakan-masalah/>.
- Tirto.id. (2019). *Menilik Masifnya Alokasi Belanja Pegawai Pemerintah daerah*. Diakses pada 29 November 2019, dari <https://tirto.id/menilik-masifnya-alokasi-belanja-pegawai-pemerintah-daerah-empto.i>.

LAMPIRAN I

ANALISA DATA TAHUN 2016

NO	NAMA	TAHUN	LEVERAGE (X1)	UKURAN LEGISLATIF (X2)	IR (X3)	TOTAL ASET (X4)	TEMUAN AUDIT BPK (X5)	OPINI AUDIT BPK (X6)	RASIO EFEKTIVITAS (Y1)	RASIO EFISIENSI (Y2)
1	Kabupaten Pandeglang	2016	0.0051	50	0.7482	Rp 2,827,251,001,848.97	26	5	1.0212	1.0026
2	Kabupaten Tangerang	2016	0.0035	50	0.3490	Rp 10,181,098,127,137.60	10	5	1.1707	0.9449
3	Kota Cilegon	2016	0.0184	35	0.5505	Rp 3,128,266,200,943.00	15	5	1.0068	0.9968
4	Kota Serang	2016	0.0039	45	0.7291	Rp 2,579,525,829,246.43	20	3	1.1022	0.9979
5	Kota Tangerang	2016	0.0004	50	0.3680	Rp 6,971,379,397,783.63	17	5	1.1034	1.0912
6	Kota Tangerang Selatan	2016	0.0002	50	0.3180	Rp 18,271,462,377,991.20	19	5	1.0824	1.0844
7	DKI Jakarta	2016	0.0034	106	0.2839	Rp 442,977,223,000,927.00	69	3	0.9581	0.8762
8	Kabupaten Bekasi	2016	0.0045	50	0.4223	Rp 10,943,830,165,870.00	17	5	1.0527	1.0708
9	Kabupaten Bogor	2016	0.0044	50	0.4507	Rp 18,687,360,178,967.60	12	5	1.1096	1.0824
10	Kabupaten Cianjur	2016	0.0127	50	0.6649	Rp 4,822,611,461,066.69	15	5	0.9465	0.9783
11	Kabupaten Karawang	2016	0.0180	50	0.5486	Rp 4,263,485,308,047.60	18	5	0.9992	1.0405
12	Kabupaten Majalengka	2016	0.0321	50	0.6692	Rp 4,206,700,310,663.22	8	5	0.9242	0.9827
13	Kabupaten Purwakarta	2016	0.0668	45	0.5713	Rp 2,323,920,993,437.00	17	5	0.4342	0.9525
14	Kabupaten Subang	2016	0.0080	50	0.7131	Rp 4,671,542,628,536.41	20	3	1.1061	1.0228
15	Kota Banjar	2016	0.0038	25	0.6860	Rp 1,526,772,767,370.94	14	5	0.9558	1.0773
16	Kota Bekasi	2016	0.0061	50	0.3899	Rp 10,002,095,297,617.60	15	5	0.9530	1.0424
17	Kota Bogor	2016	0.0194	45	0.5100	Rp 7,765,922,568,558.56	16	5	1.0767	0.9828
18	Kota Cirebon	2016	0.0183	35	0.6340	Rp 3,345,491,135,180.86	12	5	0.9818	1.0654
19	Kota Depok	2016	0.0045	50	0.4499	Rp 9,738,603,123,182.06	14	5	1.0889	1.1081
20	Kabupaten Banyumas	2016	0.0099	50	0.6551	Rp 5,128,213,981,695.80	12	5	1.0927	1.0175
21	Kabupaten Cilacap	2016	0.0051	50	0.6943	Rp 4,019,210,952,135.73	19	5	1.1074	1.1267
22	Kabupaten Kebumen	2016	0.0027	50	0.6829	Rp 4,090,343,910,747.84	19	3	1.0651	1.0387
23	Kabupaten Klaten	2016	0.0023	50	0.6967	Rp 3,483,587,981,231.42	10	3	1.1006	0.9628
24	Kabupaten Semarang	2016	0.0061	45	0.6702	Rp 2,759,751,487,194.45	23	5	1.0581	0.9980
25	Kabupaten Sukoharjo	2016	0.0016	45	0.6455	Rp 4,110,568,092,019.23	10	5	1.1533	0.9731
26	Kabupaten Tegal	2016	0.0165	50	0.6911	Rp 2,795,204,576,012.58	12	5	1.0108	1.1208
27	Kabupaten Temanggung	2016	0.0556	45	0.6330	Rp 2,765,376,607,594.51	9	5	1.0859	1.0363
28	Kabupaten Wonogiri	2016	0.0099	45	0.7224	Rp 3,006,724,087,436.47	10	5	1.1207	1.0481
29	Kota Pekalongan	2016	0.0045	30	0.6980	Rp 2,177,047,983,429.69	12	5	1.0035	1.0136
30	Kota Salatiga	2016	0.0063	25	0.6477	Rp 2,036,676,185,726.81	12	5	1.1794	1.0453
31	Kota Surakarta	2016	0.0059	45	0.6482	Rp 6,730,489,559,717.61	12	5	1.0794	0.9868
32	Kota Tegal	2016	0.0104	30	0.6547	Rp 2,077,720,243,078.00	22	3	1.0507	1.0225
33	Kabupaten Bantul	2016	0.0030	45	0.6656	Rp 3,030,547,431,030.00	13	5	1.0836	1.0081
34	Kabupaten Sleman	2016	0.0089	50	0.5675	Rp 3,950,817,248,484.86	10	5	1.1053	1.0542
35	Kota Yogyakarta	2016	0.0050	40	0.5549	Rp 3,750,224,434,123.31	10	5	1.0488	1.0556
36	Kabupaten Blitar	2016	0.0039	50	0.7138	Rp 3,276,050,662,672.86	11	5	1.0463	1.0573
37	Kabupaten Bondowoso	2016	0.0036	45	0.6672	Rp 2,447,998,796,537.10	11	5	1.0895	1.024
38	Kabupaten Pasuruan	2016	0.0048	50	0.6492	Rp 3,239,481,822,492.07	9	5	1.0212	1.120
39	Kabupaten Sampang	2016	0.0004	45	0.7171	Rp 3,819,318,465,508.21	12	3	0.9846	1.036

LEVERAGE 2016

NO	NAMA DAERAH	DEBT	EQUITY	LEVERAGE
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 12,693,929,676.54	Rp 2,492,866,964,557.87	0.0051
2	Kabupaten Tangerang	Rp 35,170,879,034.70	Rp 10,145,927,248,102.90	0.0035
3	Kota Cilegon	Rp 56,391,709,583.00	Rp 3,071,874,491,360.00	0.0184
4	Kota Serang	Rp 10,004,175,236.00	Rp 2,569,521,654,010.43	0.0039
5	Kota Tangerang	Rp 2,773,243,535.00	Rp 6,968,606,154,248.63	0.0004
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 4,209,715,474.78	Rp 18,267,252,662,516.40	0.0002
7	DKI Jakarta	Rp 1,485,383,731,060.00	Rp 441,491,839,269,867.00	0.0034
8	Kabupaten Bekasi	Rp 48,570,715,307.13	Rp 10,895,259,450,562.80	0.0045
9	Kabupaten Bogor	Rp 81,436,080,253.64	Rp 18,605,924,098,714.00	0.0044
10	Kabupaten Cianjur	Rp 60,490,992,056.80	Rp 4,762,120,469,009.89	0.0127
11	Kabupaten Karawang	Rp 75,521,733,198.52	Rp 4,187,963,574,849.08	0.0180
12	Kabupaten Majalengka	Rp 131,002,743,435.00	Rp 4,075,697,567,228.22	0.0321
13	Kabupaten Purwakarta	Rp 145,473,804,578.41	Rp 2,178,447,188,858.59	0.0668
14	Kabupaten Subang	Rp 36,975,371,534.67	Rp 4,634,567,257,001.74	0.0080
15	Kota Banjar	Rp 5,848,760,453.38	Rp 1,520,924,006,917.60	0.0038
16	Kota Bekasi	Rp 60,924,518,848.21	Rp 9,941,170,778,769.39	0.0061
17	Kota Bogor	Rp 147,697,712,320.63	Rp 7,618,224,856,237.93	0.0194
18	Kota Cirebon	Rp 60,105,307,329.54	Rp 3,285,385,827,851.32	0.0183
19	Kota Depok	Rp 44,011,197,402.49	Rp 9,694,591,925,779.57	0.0045
20	Kabupaten Banyumas	Rp 50,369,582,708.34	Rp 5,077,844,398,987.46	0.0099
21	Kabupaten Cilacap	Rp 20,391,664,215.15	Rp 3,998,819,287,920.58	0.0051
22	Kabupaten Kebumen	Rp 11,088,304,990.00	Rp 4,079,255,605,757.84	0.0027
23	Kabupaten Klaten	Rp 8,050,386,150.00	Rp 3,475,537,595,081.42	0.0023
24	Kabupaten Semarang	Rp 16,846,732,388.17	Rp 2,742,904,754,806.28	0.0061
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp 6,453,989,486.00	Rp 4,104,114,102,533.23	0.0016
26	Kabupaten Tegal	Rp 45,365,115,148.99	Rp 2,749,839,460,863.59	0.0165
27	Kabupaten Temanggung	Rp 145,540,407,752.62	Rp 2,619,836,199,841.89	0.0556
28	Kabupaten Wonogiri	Rp 29,499,334,847.00	Rp 2,977,224,752,589.47	0.0099
29	Kota Pekalongan	Rp 9,848,921,850.04	Rp 2,167,199,061,579.65	0.0045
30	Kota Salatiga	Rp 12,742,525,784.59	Rp 2,023,933,659,942.22	0.0063
31	Kota Surakarta	Rp 39,634,437,754.02	Rp 6,690,855,121,963.59	0.0059
32	Kota Tegal	Rp 21,361,022,377.00	Rp 2,056,359,220,701.00	0.0104
33	Kabupaten Bantul	Rp 9,042,658,284.00	Rp 3,021,504,772,747.00	0.0030
34	Kabupaten Sleman	Rp 34,861,243,683.94	Rp 3,915,956,004,800.92	0.0089
35	Kota Yogyakarta	Rp 18,477,351,530.44	Rp 3,731,747,082,592.87	0.0050
36	Kabupaten Blitar	Rp 12,617,175,907.96	Rp 3,263,433,486,764.90	0.0039
37	Kabupaten Bondowoso	Rp 8,883,169,282.04	Rp 2,439,115,627,255.06	0.0036
38	Kabupaten Pasuruan	Rp 15,613,417,950.62	Rp 3,223,868,404,541.45	0.0048
39	Kabupaten Sampang	Rp 1,363,790,679.66	Rp 3,817,954,674,828.55	0.0004

UKURAN LEGISLATIF 2016

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH ANGGOTA DPRD
1	Kabupaten Pandeglang	50
2	Kabupaten Tangerang	50
3	Kota Cilegon	35
4	Kota Serang	45
5	Kota Tangerang	50
6	Kota Tangerang Selatan	50
7	DKI Jakarta	106
8	Kabupaten Bekasi	50
9	Kabupaten Bogor	50
10	Kabupaten Cianjur	50
11	Kabupaten Karawang	50
12	Kabupaten Majalengka	50
13	Kabupaten Purwakarta	45
14	Kabupaten Subang	50
15	Kota Banjar	25
16	Kota Bekasi	50
17	Kota Bogor	45
18	Kota Cirebon	35
19	Kota Depok	50
20	Kabupaten Banyumas	50
21	Kabupaten Cilacap	50
22	Kabupaten Kebumen	50
23	Kabupaten Klaten	50
24	Kabupaten Semarang	45
25	Kabupaten Sukoharjo	45
26	Kabupaten Tegal	50
27	Kabupaten Temanggung	45
28	Kabupaten Wonogiri	45
29	Kota Pekalongan	30
30	Kota Salatiga	25
31	Kota Surakarta	45
32	Kota Tegal	30
33	Kabupaten Bantul	45
34	Kabupaten Sleman	50
35	Kota Yogyakarta	40
36	Kabupaten Blitar	50
37	Kabupaten Bondowoso	45
38	Kabupaten Pasuruan	50
39	Kabupaten Sampang	45

INTERGOVERNMENTAL REVENUE 2016

NO	NAMA DAERAH	DANA PERIMBANGAN	TOT. PENDAPATAN DAERAH	IR
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 1,653,367,105,148.00	Rp 2,209,655,129,381.00	0.7482
2	Kabupaten Tangerang	Rp 1,674,962,669,359.00	Rp 4,799,673,684,723.00	0.3490
3	Kota Cilegon	Rp 891,105,528,340.00	Rp 1,618,573,368,773.00	0.5505
4	Kota Serang	Rp 825,491,157,313.00	Rp 1,132,266,273,590.00	0.7291
5	Kota Tangerang	Rp 1,247,006,679,649.00	Rp 3,388,541,592,672.00	0.3680
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 847,221,054,205.00	Rp 2,664,158,764,561.24	0.3180
7	DKI Jakarta	Rp 15,271,661,452,714.00	Rp 53,784,706,312,513.00	0.2839
8	Kabupaten Bekasi	Rp 1,932,027,212,663.00	Rp 4,575,142,744,381.00	0.4223
9	Kabupaten Bogor	Rp 2,692,167,023,139.00	Rp 5,973,280,685,745.97	0.4507
10	Kabupaten Cianjur	Rp 2,155,469,458,260.00	Rp 3,241,659,038,317.00	0.6649
11	Kabupaten Karawang	Rp 1,959,371,891,794.00	Rp 3,571,605,879,355.00	0.5486
12	Kabupaten Majalengka	Rp 1,723,845,574,035.00	Rp 2,576,052,108,544.00	0.6692
13	Kabupaten Purwakarta	Rp 1,076,034,722,218.00	Rp 1,883,533,939,269.00	0.5713
14	Kabupaten Subang	Rp 1,833,456,369,768.00	Rp 2,571,077,097,133.00	0.7131
15	Kota Banjar	Rp 559,042,960,068.00	Rp 814,969,579,658.00	0.6860
16	Kota Bekasi	Rp 1,647,365,217,172.00	Rp 4,225,314,416,408.40	0.3899
17	Kota Bogor	Rp 1,097,614,311,436.00	Rp 2,152,370,082,886.00	0.5100
18	Kota Cirebon	Rp 870,837,793,607.00	Rp 1,373,624,806,723.00	0.6340
19	Kota Depok	Rp 1,118,681,655,636.00	Rp 2,486,470,138,301.15	0.4499
20	Kabupaten Banyumas	Rp 1,869,097,347,790.00	Rp 2,852,968,390,191.00	0.6551
21	Kabupaten Cilacap	Rp 1,941,145,933,885.00	Rp 2,796,010,344,654.42	0.6943
22	Kabupaten Kebumen	Rp 1,779,771,732,786.00	Rp 2,606,209,824,034.00	0.6829
23	Kabupaten Klaten	Rp 1,573,615,108,481.00	Rp 2,258,604,630,605.19	0.6967
24	Kabupaten Semarang	Rp 1,325,779,762,120.00	Rp 1,978,138,017,128.00	0.6702
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp 1,246,954,769,893.00	Rp 1,931,896,575,824.00	0.6455
26	Kabupaten Tegal	Rp 1,493,483,951,400.00	Rp 2,161,161,059,587.60	0.6911
27	Kabupaten Temanggung	Rp 1,062,555,838,091.00	Rp 1,678,688,079,170.00	0.6330
28	Kabupaten Wonogiri	Rp 1,470,168,336,258.00	Rp 2,035,056,535,365.00	0.7224
29	Kota Pekalongan	Rp 598,621,163,830.00	Rp 857,642,985,779.00	0.6980
30	Kota Salatiga	Rp 569,849,837,883.00	Rp 879,784,189,262.00	0.6477
31	Kota Surakarta	Rp 1,103,862,166,264.00	Rp 1,703,003,847,995.00	0.6482
32	Kota Tegal	Rp 688,199,236,193.00	Rp 1,051,121,466,005.00	0.6547
33	Kabupaten Bantul	Rp 1,331,352,777,163.00	Rp 2,000,334,166,353.84	0.6656
34	Kabupaten Sleman	Rp 1,321,660,504,762.00	Rp 2,329,097,456,006.80	0.5675
35	Kota Yogyakarta	Rp 875,430,545,057.00	Rp 1,577,679,933,045.20	0.5549
36	Kabupaten Blitar	Rp 1,599,003,618,435.00	Rp 2,240,251,740,265.22	0.7138
37	Kabupaten Bondowoso	Rp 1,297,761,524,802.00	Rp 1,945,061,615,767.86	0.6672
38	Kabupaten Pasuruan	Rp 1,831,738,785,197.00	Rp 2,821,450,055,077.31	0.6492
39	Kabupaten Sampang	Rp 1,231,099,448,705.00	Rp 1,716,788,104,536.16	0.7171

UKURAN PEMERINTAH DAERAH 2016

NO	NAMA DAERAH	TOTAL ASET
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 2,505,560,894,234.41
2	Kabupaten Tangerang	Rp 10,181,098,127,137.60
3	Kota Cilegon	Rp 3,128,266,200,943.00
4	Kota Serang	Rp 2,579,525,829,246.43
5	Kota Tangerang	Rp 6,971,379,397,783.63
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 18,271,462,377,991.20
7	DKI Jakarta	Rp 442,977,223,000,927.00
8	Kabupaten Bekasi	Rp 10,943,830,165,870.00
9	Kabupaten Bogor	Rp 18,687,360,178,967.60
10	Kabupaten Cianjur	Rp 4,822,611,461,066.69
11	Kabupaten Karawang	Rp 4,263,485,308,047.60
12	Kabupaten Majalengka	Rp 4,206,700,310,663.22
13	Kabupaten Purwakarta	Rp 2,323,920,993,437.00
14	Kabupaten Subang	Rp 4,671,542,628,536.41
15	Kota Banjar	Rp 1,526,772,767,370.94
16	Kota Bekasi	Rp 10,002,095,297,617.60
17	Kota Bogor	Rp 7,765,922,568,558.56
18	Kota Cirebon	Rp 3,345,491,135,180.86
19	Kota Depok	Rp 9,738,603,123,182.06
20	Kabupaten Banyumas	Rp 5,128,213,981,696
21	Kabupaten Cilacap	Rp 4,019,210,952,136
22	Kabupaten Kebumen	Rp 4,090,343,910,747.84
23	Kabupaten Klaten	Rp 3,483,587,981,231.42
24	Kabupaten Semarang	Rp 2,759,751,487,194.45
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp 4,110,568,092,019.23
26	Kabupaten Tegal	Rp 2,795,204,576,012.58
27	Kabupaten Temanggung	Rp 2,765,376,607,594.51
28	Kabupaten Wonogiri	Rp 3,006,724,087,436.47
29	Kota Pekalongan	Rp 2,177,047,983,429.69
30	Kota Salatiga	Rp 2,036,676,185,726.81
31	Kota Surakarta	Rp 6,730,489,559,717.61
32	Kota Tegal	Rp 2,077,720,243,078.00
33	Kabupaten Bantul	Rp 3,030,547,431,030.00
34	Kabupaten Sleman	Rp 3,950,817,248,484.86
35	Kota Yogyakarta	Rp 3,750,224,434,123.31
36	Kabupaten Blitar	Rp 3,276,050,662,672.86
37	Kabupaten Bondowoso	Rp 2,447,998,796,537.10
38	Kabupaten Pasuruan	Rp 3,239,481,822,492.07
39	Kabupaten Sampang	Rp 3,819,318,465,508.21

TEMUAN AUDIT BPK 2016

NO	NAMA DAERAH	SIP	KEP	TOTAL
1	Kabupaten Pandeglang	13	13	26
2	Kabupaten Tangerang	6	4	10
3	Kota Cilegon	10	5	15
4	Kota Serang	10	10	20
5	Kota Tangerang	10	7	17
6	Kota Tangerang Selatan	9	10	19
7	DKI Jakarta	39	30	69
8	Kabupaten Bekasi	7	10	17
9	Kabupaten Bogor	3	9	12
10	Kabupaten Cianjur	6	9	15
11	Kabupaten Karawang	9	9	18
12	Kabupaten Majalengka	5	3	8
13	Kabupaten Purwakarta	7	10	17
14	Kabupaten Subang	16	4	20
15	Kota Banjar	4	10	14
16	Kota Bekasi	8	7	15
17	Kota Bogor	10	6	16
18	Kota Cirebon	3	9	12
19	Kota Depok	8	6	14
20	Kabupaten Bannyumas	7	5	12
21	Kabupaten Cilacap	11	8	19
22	Kabupaten Kebumen	11	8	19
23	Kabupaten Klaten	4	6	10
24	Kabupaten Semarang	12	11	23
25	Kabupaten Sukoharjo	4	6	10
26	Kabupaten Tegal	5	7	12
27	Kabupaten Temanggung	5	4	9
28	Kabupaten Wonogiri	6	4	10
29	Kota Pekalongan	7	5	12
30	Kota Salatiga	4	8	12
31	Kota Surakarta	5	7	12
32	Kota Tegal	12	10	22
33	Kabupaten Bantul	6	7	13
34	Kabupaten Sleman	7	3	10
35	Kota Yogyakarta	7	3	10
36	Kabupaten Blitar	7	4	11
37	Kabupaten Bondowoso	4	7	11
38	Kabupaten Pasuruan	4	5	9
39	Kabupaten Sampang	7	5	12

OPINI AUDIT BPK 2016

NO	NAMA DAERAH	OPINI	SKALA
1	Kabupaten Pandeglang	WTP	5
2	Kabupaten Tangerang	WTP	5
3	Kota Cilegon	WTP	5
4	Kota Serang	WDP	3
5	Kota Tangerang	WTP	5
6	Kota Tangerang Selatan	WTP	5
7	DKI Jakarta	WDP	3
8	Kabupaten Bekasi	WTP	5
9	Kabupaten Bogor	WTP	5
10	Kabupaten Cianjur	WTP	5
11	Kabupaten Karawang	WTP	5
12	Kabupaten Majalengka	WTP	5
13	Kabupaten Purwakarta	WTP	5
14	Kabupaten Subang	WDP	3
15	Kota Banjar	WTP	5
16	Kota Bekasi	WTP	5
17	Kota Bogor	WTP	5
18	Kota Cirebon	WTP	5
19	Kota Depok	WTP	5
20	Kabupaten Banyumas	WTP	5
21	Kabupaten Cilacap	WTP	5
22	Kabupaten Kebumen	WDP	3
23	Kabupaten Klaten	WDP	3
24	Kabupaten Semarang	WTP	5
25	Kabupaten Sukoharjo	WTP	5
26	Kabupaten Tegal	WTP	5
27	Kabupaten Temanggung	WTP	5
28	Kabupaten Wonogiri	WTP	5
29	Kota Pekalongan	WTP	5
30	Kota Salatiga	WTP	5
31	Kota Surakarta	WTP	5
32	Kota Tegal	WDP	3
33	Kabupaten Bantul	WTP	5
34	Kabupaten Sleman	WTP	5
35	Kota Yogyakarta	WTP	5
36	Kabupaten Blitar	WTP	5
37	Kabupaten Bondowoso	WTP	5
38	Kabupaten Pasuruan	WTP	5
39	Kabupaten Sampang	WDP	3

RASIO EFEKTIVITAS 2016

NO	NAMA DAERAH	REALISASI PAD	ANGGARAN PAD	RASIO EFEK.
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 198,750,877,114	Rp 194,616,153,452	1.0212
2	Kabupaten Tangerang	Rp 2,054,715,995,931	Rp 1,755,081,466,124	1.1707
3	Kota Cilegon	Rp 567,671,194,175	Rp 563,851,613,135	1.0068
4	Kota Serang	Rp 126,900,900,019	Rp 115,139,113,647	1.1022
5	Kota Tangerang	Rp 1,590,080,330,000	Rp 1,441,101,841,668	1.1034
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 1,346,240,155,744	Rp 1,243,705,400,000	1.0824
7	DKI Jakarta	Rp 36,888,017,587,716	Rp 38,501,784,839,738	0.9581
8	Kabupaten Bekasi	Rp 1,917,814,673,704	Rp 1,821,886,551,682	1.0527
9	Kabupaten Bogor	Rp 2,292,175,674,801	Rp 2,065,822,879,000	1.1096
10	Kabupaten Cianjur	Rp 455,156,876,756	Rp 480,885,159,887	0.9465
11	Kabupaten Karawang	Rp 1,003,391,893,371	Rp 1,004,163,200,591	0.9992
12	Kabupaten Majalengka	Rp 331,527,582,021	Rp 358,711,291,654	0.9242
13	Kabupaten Purwakarta	Rp 341,116,103,330	Rp 785,634,387,261	0.4342
14	Kabupaten Subang	Rp 360,621,618,141	Rp 326,015,455,956	1.1061
15	Kota Banjar	Rp 116,321,781,013	Rp 121,701,895,506	0.9558
16	Kota Bekasi	Rp 1,607,389,410,491	Rp 1,686,660,486,524	0.9530
17	Kota Bogor	Rp 783,873,587,219	Rp 728,030,823,933	1.0767
18	Kota Cirebon	Rp 363,117,732,284	Rp 369,844,281,000	0.9818
19	Kota Depok	Rp 922,297,784,280	Rp 847,022,899,152	1.0889
20	Kabupaten Banyumas	Rp 541,418,386,912	Rp 495,482,076,976	1.0927
21	Kabupaten Cilacap	Rp 428,598,349,897	Rp 387,045,051,000	1.1074
22	Kabupaten Kebumen	Rp 291,016,321,703	Rp 273,228,579,000	1.0651
23	Kabupaten Klaten	Rp 224,197,408,481	Rp 203,699,708,000	1.1006
24	Kabupaten Semarang	Rp 318,536,051,176	Rp 301,041,793,000	1.0581
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp 363,163,428,162	Rp 314,896,567,000	1.1533
26	Kabupaten Tegal	Rp 316,051,189,734	Rp 312,688,892,000	1.0108
27	Kabupaten Temanggung	Rp 281,328,148,970	Rp 259,065,008,786	1.0859
28	Kabupaten Wonogiri	Rp 218,604,854,595	Rp 195,059,310,821	1.1207
29	Kota Pekalongan	Rp 178,604,460,870	Rp 177,984,656,000	1.0035
30	Kota Salatiga	Rp 203,768,652,017	Rp 172,775,326,000	1.1794
31	Kota Surakarta	Rp 425,502,779,064	Rp 394,200,858,000	1.0794
32	Kota Tegal	Rp 287,343,889,954	Rp 273,470,357,000	1.0507
33	Kabupaten Bantul	Rp 404,454,703,746	Rp 373,241,806,617	1.0836
34	Kabupaten Sleman	Rp 717,151,176,029	Rp 648,841,915,155	1.1053
35	Kota Yogyakarta	Rp 540,504,305,182	Rp 515,345,413,629	1.0488
36	Kabupaten Blitar	Rp 224,106,765,169	Rp 214,186,478,671	1.0463
37	Kabupaten Bondowoso	Rp 177,025,949,242	Rp 162,486,518,199	1.0895
38	Kabupaten Pasuruan	Rp 480,758,720,671	Rp 470,764,895,776	1.0212
39	Kabupaten Sampang	Rp 135,785,953,318	Rp 137,906,230,923	0.9846

RASIO EFISIENSI 2016

NO	NAMA DAERAH	TOT. REALISASI BELANJA DAERAH	TOT. REALISASI PENDAPATAN DAERAH	RASIO EFIS.
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 2,215,360,536,782.61	Rp 2,209,655,129,381.00	1.0026
2	Kabupaten Tangerang	Rp 4,535,329,446,273.00	Rp 4,799,673,684,723.00	0.9449
3	Kota Cilegon	Rp 1,613,348,915,237.00	Rp 1,618,573,368,773.00	0.9968
4	Kota Serang	Rp 1,129,841,327,429.00	Rp 1,132,266,273,590.00	0.9979
5	Kota Tangerang	Rp 3,697,410,215,147.00	Rp 3,388,541,592,672.00	1.0912
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 2,888,885,248,322.00	Rp 2,664,158,764,561.24	1.0844
7	DKI Jakarta	Rp 47,128,810,245,854.00	Rp 53,784,706,312,513.00	0.8762
8	Kabupaten Bekasi	Rp 4,899,021,295,417.00	Rp 4,575,142,744,381.00	1.0708
9	Kabupaten Bogor	Rp 6,465,300,553,876.00	Rp 5,973,280,685,745.97	1.0824
10	Kabupaten Cianjur	Rp 3,171,220,156,744.59	Rp 3,241,659,038,317.00	0.9783
11	Kabupaten Karawang	Rp 3,716,163,710,890.30	Rp 3,571,605,879,355.00	1.0405
12	Kabupaten Majalengka	Rp 2,531,398,759,150.94	Rp 2,576,052,108,544.00	0.9827
13	Kabupaten Purwakarta	Rp 1,794,157,784,624.00	Rp 1,883,533,939,269.00	0.9525
14	Kabupaten Subang	Rp 2,629,608,760,193.00	Rp 2,571,077,097,133.00	1.0228
15	Kota Banjar	Rp 877,982,552,169.00	Rp 814,969,579,658.00	1.0773
16	Kota Bekasi	Rp 4,404,495,132,194.82	Rp 4,225,314,416,408.40	1.0424
17	Kota Bogor	Rp 2,115,296,888,270.00	Rp 2,152,370,082,886.00	0.9828
18	Kota Cirebon	Rp 1,463,440,701,758.00	Rp 1,373,624,806,723.00	1.0654
19	Kota Depok	Rp 2,755,256,803,566.27	Rp 2,486,470,138,301.15	1.1081
20	Kabupaten Banjumas	Rp 2,902,853,581,862.00	Rp 2,852,968,390,191.00	1.0175
21	Kabupaten Cilacap	Rp 3,150,325,840,872.00	Rp 2,796,010,344,654.42	1.1267
22	Kabupaten Kebumen	Rp 2,707,059,847,131.00	Rp 2,606,209,824,034.00	1.0387
23	Kabupaten Klaten	Rp 2,174,550,555,820.00	Rp 2,258,604,630,605.19	0.9628
24	Kabupaten Semarang	Rp 1,974,199,071,108.77	Rp 1,978,138,017,128.00	0.9980
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp 1,879,860,885,343.00	Rp 1,931,896,575,824.00	0.9731
26	Kabupaten Tegal	Rp 2,422,128,524,079.00	Rp 2,161,161,059,587.60	1.1208
27	Kabupaten Temanggung	Rp 1,739,541,988,789.00	Rp 1,678,688,079,170.00	1.0363
28	Kabupaten Wonogiri	Rp 2,132,909,652,036.00	Rp 2,035,056,535,365.00	1.0481
29	Kota Pekalongan	Rp 869,324,083,854.00	Rp 857,642,985,779.00	1.0136
30	Kota Salatiga	Rp 919,667,517,133.00	Rp 879,784,189,262.00	1.0453
31	Kota Surakarta	Rp 1,680,456,921,161.00	Rp 1,703,003,847,995.00	0.9868
32	Kota Tegal	Rp 1,074,739,578,886.00	Rp 1,051,121,466,005.00	1.0225
33	Kabupaten Bantul	Rp 2,016,543,978,974	Rp 2,000,334,166,353.84	1.0081
34	Kabupaten Sleman	Rp 2,455,446,948,874	Rp 2,329,097,456,006.80	1.0542
35	Kota Yogyakarta	Rp 1,665,420,970,709	Rp 1,577,679,933,045.20	1.0556
36	Kabupaten Blitar	Rp 2,368,672,195,620.00	Rp 2,240,251,740,265.22	1.0573
37	Kabupaten Bondowoso	Rp 1,992,640,093,664.50	Rp 1,945,061,615,767.86	1.024
38	Kabupaten Pasuruan	Rp 3,159,908,257,412.55	Rp 2,821,450,055,077.31	1.120
39	Kabupaten Sampang	Rp 1,778,548,485,250.94	Rp 1,716,788,104,536.16	1.036

ANALISA DATA TAHUN 2017

NO	NAMA	TAHUN	LEVERAGE (X1)	UKURAN LEGISLATIF (X2)	IR (X3)	TOTAL ASET (X4)	TEMUAN AUDIT BPK (X5)	OPINI AUDIT BPK (X6)	RASIO EFEKTIVITAS (Y1)	RASIO EFISIENSI (Y2)
1	Kabupaten Pandeglang	2017	0.015690589	50	0.6664	Rp 2,920,488,816,249.31	13	5	1.1020	0.9449
2	Kabupaten Tangerang	2017	0.006408781	50	0.3224	Rp 11,961,568,769,050.60	7	5	1.2776	0.9377
3	Kota Cilegon	2017	0.003129029	35	0.4957	Rp 3,352,412,944,014.00	9	5	0.8535	0.9755
4	Kota Serang	2017	0.004719121	45	0.7125	Rp 2,208,934,685,576.36	12	5	1.0821	1.0805
5	Kota Tangerang	2017	0.000778154	50	0.3365	Rp 7,580,528,269,909.30	12	5	1.2005	0.9913
6	Kota Tangerang Selatan	2017	0.000320968	50	0.2890	Rp 19,138,345,302,900.90	13	5	1.1199	0.9891
7	DKI Jakarta	2017	0.0058	106	0.2926	Rp 464,601,747,133,156.00	67	5	1.0531	0.7878
8	Kabupaten Bandung Barat	2017	0.0013	50	0.5830	Rp 3,317,744,837,732.28	15	3	1.1660	0.9483
9	Kabupaten Bekasi	2017	0.0070	50	0.3703	Rp 11,567,456,608,776.30	12	5	1.0481	0.9707
10	Kabupaten Bogor	2017	0.0042	50	0.3932	Rp 21,285,843,792,604.20	19	5	1.3326	0.9858
11	Kabupaten Ciamis	2017	0.0290	50	0.6640	Rp 3,143,991,962,867.06	13	5	1.0406	0.9783
12	Kabupaten Cianjur	2017	0.0199	50	0.5848	Rp 5,450,238,298,390.07	19	5	0.9637	0.9734
13	Kabupaten Karawang	2017	0.0217	50	0.4868	Rp 4,489,084,553,295.65	16	5	0.9412	1.0005
14	Kabupaten Majalengka	2017	0.0353	50	0.6293	Rp 4,424,942,597,346.32	9	5	0.9062	0.9827
15	Kabupaten Purwakarta	2017	0.0723	45	0.5100	Rp 2,592,329,478,411.00	30	5	0.5665	0.9406
16	Kabupaten Subang	2017	0.0058	50	0.6447	Rp 4,461,116,773,301.91	15	3	1.0579	1.0316
17	Kota Bekasi	2017	0.0107	50	0.3441	Rp 11,395,890,155,018.50	16	5	0.8451	1.0474
18	Kota Bogor	2017	0.0131	45	0.4685	Rp 7,993,898,200,465.54	12	5	1.0658	0.9809
19	Kabupaten Banyumas	2017	0.0086	50	0.5800	Rp 5,463,777,382,017.12	14	5	1.0852	0.9936
20	Kabupaten Batang	2017	0.0168	45	0.6343	Rp 2,403,414,307,811.48	16	5	1.0020	0.9981
21	Kabupaten Brebes	2017	0.0179	50	0.6142	Rp 3,469,695,842,864.10	13	3	1.0251	0.9687
22	Kabupaten Cilacap	2017	0.0074	50	0.6113	Rp 3,873,602,950,205.25	19	5	1.0588	0.9827
23	Kabupaten Kendal	2017	0.0067	45	0.6144	Rp 3,015,473,983,604.52	21	5	1.0231	1.0216
24	Kabupaten Klaten	2017	0.0032	50	0.6294	Rp 3,726,733,115,067.24	13	3	1.1079	0.9614
25	Kabupaten Magelang	2017	0.0046	50	0.5116	Rp 3,019,208,420,028.09	14	5	1.0104	1.0793
26	Kabupaten Pematang	2017	0.0072	50	0.6606	Rp 3,227,551,323,034.14	18	5	1.0507	0.9598
27	Kabupaten Purbalingga	2017	0.0180	45	0.6346	Rp 2,406,468,280,774.61	20	5	1.0229	1.0285
28	Kabupaten Purworejo	2017	0.0033	45	0.5709	Rp 2,588,956,121,375.38	13	5	1.1098	1.0711
29	Kabupaten Semarang	2017	0.0052	45	0.6013	Rp 3,112,499,506,159.50	17	5	1.1477	0.9528
30	Kabupaten Sukoharjo	2017	0.0027	45	0.5925	Rp 4,503,212,327,840.76	19	5	1.1878	0.9182
31	Kabupaten Tegal	2017	0.0116	50	0.6144	Rp 2,991,069,237,986.63	15	5	1.0147	1.0009
32	Kabupaten Temanggung	2017	0.0364	45	0.6054	Rp 2,943,103,837,807.52	8	5	1.0045	0.9937
33	Kota Salatiga	2017	0.0043	25	0.6719	Rp 3,034,424,879,879.15	18	5	1.1691	0.9623
34	Kota Tegal	2017	0.0114	30	0.6294	Rp 2,264,247,290,378.41	14	3	0.9868	0.9926
35	Kabupaten Bantul	2017	0.0046	45	0.6168	Rp 3,045,637,995,200.45	11	5	1.0789	0.9951
36	Kabupaten Gunungkidul	2017	0.0050	45	0.6771	Rp 2,414,131,165,857.68	8	3	1.0300	1.0071
37	Kota Yogyakarta	2017	0.0210	40	0.5251	Rp 3,883,814,170,396.54	10	5	1.1781	0.8949
38	Kabupaten Banyuwangi	2017	0.0643	50	0.6565	Rp 4,088,023,173,730.35	14	5	0.8455	1.0161
39	Kabupaten Nganjuk	2017	0.0160	45	0.6538	Rp 3,068,642,314,643.17	15	5	1.0120	0.9648
40	Kabupaten Situbondo	2017	0.0034	45	0.6733	Rp 3,372,884,332,942.08	10	5	1.0773	0.9944
41	Kabupaten Tulungagung	2017	0.0064	50	0.6136	Rp 3,385,084,017,181.58	12	5	1.1639	0.9916

LEVERAGE 2017

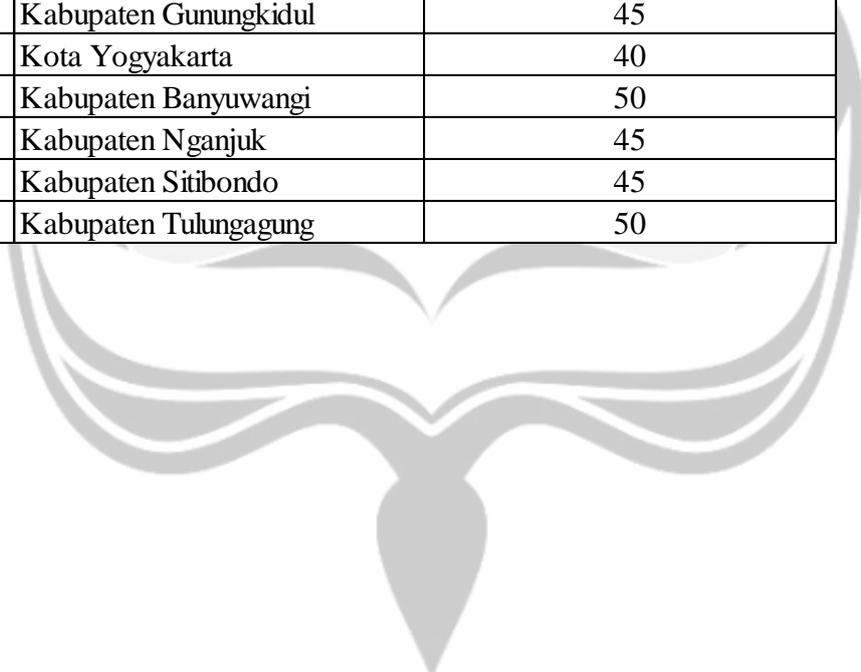
NO	NAMA DAERAH	DEBT	EQUITY	LEVERAGE
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 43,675,931,721.90	Rp 2,783,575,070,127.07	0.0157
2	Kabupaten Tangerang	Rp 76,170,906,846.70	Rp 11,885,397,862,203.80	0.0064
3	Kota Cilegon	Rp 10,457,075,355.00	Rp 3,341,955,868,659.00	0.0031
4	Kota Serang	Rp 10,375,266,992.00	Rp 2,198,559,418,584.36	0.0047
5	Kota Tangerang	Rp 5,894,229,116.00	Rp 7,574,634,040,793.29	0.0008
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 6,140,831,875.52	Rp 19,132,204,471,025.40	0.0003
7	DKI Jakarta	Rp 2,678,827,970,459.00	Rp 461,922,919,162,697.00	0.0058
8	Kabupaten Bandung Barat	Rp 4,474,753,968.00	Rp 3,362,484,581,669.60	0.0013
9	Kabupaten Bekasi	Rp 80,528,149,229.33	Rp 11,486,928,459,546.90	0.0070
10	Kabupaten Bogor	Rp 88,823,908,856.78	Rp 21,197,019,883,748.00	0.0042
11	Kabupaten Ciamis	Rp 77,738,678,191.11	Rp 2,678,933,772,475.87	0.0290
12	Kabupaten Cianjur	Rp 106,278,312,533.55	Rp 5,343,959,985,856.52	0.0199
13	Kabupaten Karawang	Rp 95,337,243,942.63	Rp 4,393,747,309,353.02	0.0217
14	Kabupaten Majalengka	Rp 150,797,313,260.33	Rp 4,274,145,284,085.99	0.0353
15	Kabupaten Purwakarta	Rp 174,681,867,212.00	Rp 2,417,647,611,199.00	0.0723
16	Kabupaten Subang	Rp 25,507,215,485.55	Rp 4,435,609,557,816.36	0.0058
17	Kota Bekasi	Rp 120,690,098,666.41	Rp 11,275,200,056,352.20	0.0107
18	Kota Bogor	Rp 103,478,687,124.70	Rp 7,890,419,513,340.84	0.0131
19	Kabupaten Banyumas	Rp 46,663,426,452.34	Rp 5,417,113,955,564.78	0.0086
20	Kabupaten Batang	Rp 39,803,243,253.76	Rp 2,363,611,064,557.72	0.0168

21	Kabupaten Brebes	Rp 61,079,587,923.61	Rp 3,408,616,254,940.49	0.0179
22	Kabupaten Cilacap	Rp 28,409,528,437.08	Rp 3,845,193,421,768.20	0.0074
23	Kabupaten Kendal	Rp 19,972,282,878.00	Rp 2,995,501,700,726.50	0.0067
24	Kabupaten Klaten	Rp 12,014,878,813.00	Rp 3,714,718,236,254.20	0.0032
25	Kabupaten Magelang	Rp 13,856,732,896.78	Rp 3,005,351,687,131.31	0.0046
26	Kabupaten Pemasang	Rp 22,913,312,541.47	Rp 3,204,638,010,492.67	0.0072
27	Kabupaten Purbalingga	Rp 42,466,785,223.79	Rp 2,364,001,495,550.82	0.0180
28	Kabupaten Purworejo	Rp 8,432,879,373.67	Rp 2,580,523,242,001.71	0.0033
29	Kabupaten Semarang	Rp 16,078,034,786.37	Rp 3,096,421,471,373.13	0.0052
30	Kabupaten Sukoharjo	Rp 12,041,825,583.83	Rp 4,491,170,502,256.90	0.0027
31	Kabupaten Tegal	Rp 34,374,096,019.00	Rp 2,956,695,141,967.63	0.0116
32	Kabupaten Temanggung	Rp 103,459,899,423.50	Rp 2,839,643,938,383.22	0.0364
33	Kota Salatiga	Rp 12,861,897,914.67	Rp 3,021,562,981,964.48	0.0043
34	Kota Tegal	Rp 25,495,430,842.00	Rp 2,238,751,859,536.40	0.0114
35	Kabupaten Bantul	Rp 13,928,880,598.80	Rp 3,031,709,114,601.65	0.0046
36	Kabupaten Gunungkidul	Rp 11,906,547,619.42	Rp 2,402,224,618,238.26	0.0050
37	Kota Yogyakarta	Rp 79,949,101,563.73	Rp 3,803,865,068,832.81	0.0210
38	Kabupaten Banyuwangi	Rp 246,921,243,114.82	Rp 3,841,101,930,615.53	0.0643
39	Kabupaten Nganjuk	Rp 48,403,673,799.92	Rp 3,020,238,640,843.25	0.0160
40	Kabupaten Sitibondo	Rp 11,488,064,727.75	Rp 3,361,396,268,214.33	0.0034
41	Kabupaten Tulungagung	Rp 21,650,323,744.70	Rp 3,363,433,693,436.88	0.0064

UKURAN LEGISLATIF 2017

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH ANGGOTA DPRD
1	Kabupaten Pandeglang	50
2	Kabupaten Tangerang	50
3	Kota Cilegon	35
4	Kota Serang	45
5	Kota Tangerang	50
6	Kota Tangerang Selatan	50
7	DKI Jakarta	106
8	Kabupaten Bandung Barat	50
9	Kabupaten Bekasi	50
10	Kabupaten Bogor	50
11	Kabupaten Ciamis	50
12	Kabupaten Cianjur	50
13	Kabupaten Karawang	50
14	Kabupaten Majalengka	50
15	Kabupaten Purwakarta	45
16	Kabupaten Subang	50
17	Kota Bekasi	50
18	Kota Bogor	45
19	Kabupaten Banyumas	50
20	Kabupaten Batang	45

21	Kabupaten Brebes	50
22	Kabupaten Cilacap	50
23	Kabupaten Kendal	45
24	Kabupaten Klaten	50
25	Kabupaten Magelang	50
26	Kabupaten Pemasang	50
27	Kabupaten Purbalingga	45
28	Kabupaten Purworejo	45
29	Kabupaten Semarang	45
30	Kabupaten Sukoharjo	45
31	Kabupaten Tegal	50
32	Kabupaten Temanggung	45
33	Kota Salatiga	25
34	Kota Tegal	30
35	Kabupaten Bantul	45
36	Kabupaten Gunungkidul	45
37	Kota Yogyakarta	40
38	Kabupaten Banyuwangi	50
39	Kabupaten Nganjuk	45
40	Kabupaten Sitibondo	45
41	Kabupaten Tulungagung	50



INTERGOVERNMENTAL REVENUE 2017

NO	NAMA DAERAH	DANA PERIMBANGAN	TOT. PENDAPATAN DAERAH	INTERGOVERNMENTAL REVENUE
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 1,643,322,506,037.00	Rp 2,465,844,714,731.00	0.6664
2	Kabupaten Tangerang	Rp 1,712,918,716,203.00	Rp 5,313,000,578,276.00	0.3224
3	Kota Cilegon	Rp 847,021,219,673.00	Rp 1,708,838,034,694.00	0.4957
4	Kota Serang	Rp 877,330,483,239.00	Rp 1,231,344,645,550.00	0.7125
5	Kota Tangerang	Rp 1,322,393,475,160.00	Rp 3,930,164,161,844.00	0.3365
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 867,028,622,374.00	Rp 3,000,278,801,133.00	0.2890
7	DKI Jakarta	Rp 18,969,291,389,929.00	Rp 64,823,887,369,819.00	0.2926
8	Kabupaten Bandung Barat	Rp 1,587,392,734,673.00	Rp 2,722,712,944,566.09	0.5830
9	Kabupaten Bekasi	Rp 1,848,535,366,125.00	Rp 4,992,469,141,323.00	0.3703
10	Kabupaten Bogor	Rp 2,742,839,370,823.00	Rp 6,975,053,078,040.35	0.3932
11	Kabupaten Ciamis	Rp 1,714,552,477,580.00	Rp 2,582,166,044,869.56	0.6640
12	Kabupaten Cianjur	Rp 2,201,273,702,768.00	Rp 3,764,267,630,006.53	0.5848
13	Kabupaten Karawang	Rp 2,017,808,510,547.00	Rp 4,144,829,706,439.00	0.4868
14	Kabupaten Majalengka	Rp 1,689,901,152,919.00	Rp 2,685,374,288,724.55	0.6293
15	Kabupaten Purwakarta	Rp 1,097,350,002,986.00	Rp 2,151,598,579,948.00	0.5100
16	Kabupaten Subang	Rp 1,846,205,237,437.00	Rp 2,863,712,688,880.00	0.6447
17	Kota Bekasi	Rp 1,636,851,744,218.00	Rp 4,756,703,208,558.95	0.3441
18	Kota Bogor	Rp 1,072,486,473,770.00	Rp 2,289,359,362,675.33	0.4685
19	Kabupaten Banjarnegara	Rp 1,868,367,395,431.00	Rp 3,221,258,052,894.00	0.5800
20	Kabupaten Batang	Rp 993,464,937,327.00	Rp 1,566,154,720,813.58	0.6343



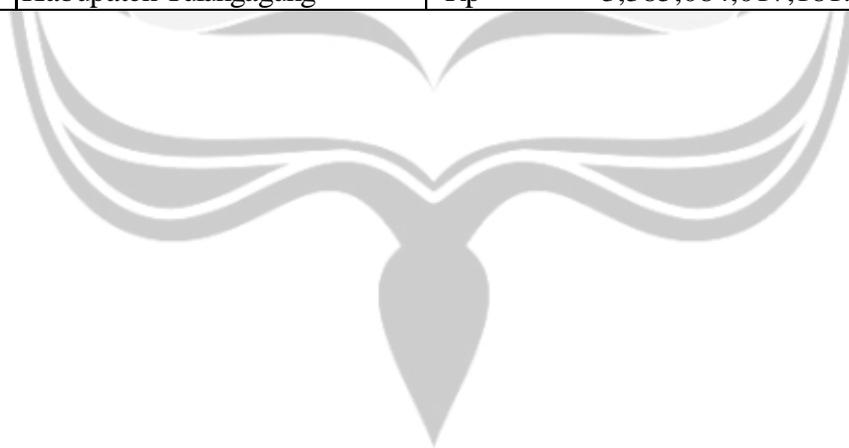
21	Kabupaten Brebes	Rp 1,754,591,823,619.00	Rp 2,856,934,060,543.79	0.6142
22	Kabupaten Cilacap	Rp 1,874,953,083,082.00	Rp 3,067,274,791,139.69	0.6113
23	Kabupaten Kendal	Rp 1,258,083,866,285.00	Rp 2,047,555,046,096.00	0.6144
24	Kabupaten Klaten	Rp 1,624,715,625,119.00	Rp 2,581,515,295,917.04	0.6294
25	Kabupaten Magelang	Rp 1,161,979,715,539.00	Rp 2,271,336,015,858.00	0.5116
26	Kabupaten Pemalang	Rp 1,554,319,330,524.00	Rp 2,353,030,274,957.00	0.6606
27	Kabupaten Purbalingga	Rp 1,242,607,095,713.00	Rp 1,957,994,897,247.00	0.6346
28	Kabupaten Purworejo	Rp 1,207,260,306,714.00	Rp 2,114,807,792,154.00	0.5709
29	Kabupaten Semarang	Rp 1,283,938,368,800.00	Rp 2,135,227,865,430.80	0.6013
30	Kabupaten Sukoharjo	Rp 1,217,877,693,551.00	Rp 2,055,571,033,667.00	0.5925
31	Kabupaten Tegal	Rp 1,505,671,807,702.00	Rp 2,450,766,552,130.20	0.6144
32	Kabupaten Temanggung	Rp 1,077,448,076,741.00	Rp 1,779,850,394,321.00	0.6054
33	Kota Salatiga	Rp 593,098,550,929.00	Rp 882,746,082,111.00	0.6719
34	Kota Tegal	Rp 644,940,136,542.00	Rp 1,024,765,938,276.99	0.6294
35	Kabupaten Bantul	Rp 1,287,256,262,558.00	Rp 2,086,878,989,570.45	0.6168
36	Kabupaten Gunungkidul	Rp 1,250,742,434,026.00	Rp 1,847,105,418,583.10	0.6771
37	Kota Yogyakarta	Rp 871,360,226,464.00	Rp 1,659,277,141,816.66	0.5251
38	Kabupaten Banyuwangi	Rp 1,793,664,689,557.00	Rp 2,732,022,666,956.37	0.6565
39	Kabupaten Nganjuk	Rp 1,503,523,174,920.00	Rp 2,299,759,167,913.45	0.6538
40	Kabupaten Situbondo	Rp 1,091,000,194,656.00	Rp 1,620,456,354,002.13	0.6733
41	Kabupaten Tulungagung	Rp 1,594,108,897,063.00	Rp 2,598,104,487,656.52	0.6136



UKURAN PEMERINTAH DAERAH 2017

NO	NAMA DAERAH	TOTAL ASET
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 2,827,251,001,848.97
2	Kabupaten Tangerang	Rp 11,961,568,769,050.60
3	Kota Cilegon	Rp 3,352,412,944,014.00
4	Kota Serang	Rp 2,208,934,685,576.36
5	Kota Tangerang	Rp 7,580,528,269,909.30
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 19,138,345,302,900.90
7	DKI Jakarta	Rp 464,601,747,133,156.00
8	Kabupaten Bandung Barat	Rp 3,366,959,335,637.62
9	Kabupaten Bekasi	Rp 11,567,456,608,776.30
10	Kabupaten Bogor	Rp 21,285,843,792,604.20
11	Kabupaten Ciamis	Rp 2,756,672,450,672.48
12	Kabupaten Cianjur	Rp 5,450,238,298,390.07
13	Kabupaten Karawang	Rp 4,489,084,553,295.65
14	Kabupaten Majalengka	Rp 4,424,942,597,346.32
15	Kabupaten Purwakarta	Rp 2,592,329,478,411.00
16	Kabupaten Subang	Rp 4,461,116,773,301.91
17	Kota Bekasi	Rp 11,395,890,155,018.50
18	Kota Bogor	Rp 7,993,898,200,465.54
19	Kabupaten Banyumas	Rp 5,463,777,382,017.12
20	Kabupaten Batang	Rp 2,403,414,307,811.48

21	Kabupaten Brebes	Rp	3,469,695,842,864.10
22	Kabupaten Cilacap	Rp	3,873,602,950,205.25
23	Kabupaten Kendal	Rp	3,015,473,983,604.52
24	Kabupaten Klaten	Rp	3,726,733,115,067.24
25	Kabupaten Magelang	Rp	3,019,208,420,028.09
26	Kabupaten Pemasang	Rp	3,227,551,323,034.14
27	Kabupaten Purbalingga	Rp	2,406,468,280,774.61
28	Kabupaten Purworejo	Rp	2,588,956,121,375.38
29	Kabupaten Semarang	Rp	3,112,499,506,159.50
30	Kabupaten Sukoharjo	Rp	4,503,212,327,840.76
31	Kabupaten Tegal	Rp	2,991,069,237,986.63
32	Kabupaten Temanggung	Rp	2,943,103,837,807.52
33	Kota Salatiga	Rp	3,034,424,879,879.15
34	Kota Tegal	Rp	2,264,247,290,378.41
35	Kabupaten Bantul	Rp	3,045,637,995,200.45
36	Kabupaten Gunungkidul	Rp	2,414,131,165,857.68
37	Kota Yogyakarta	Rp	3,883,814,170,396.54
38	Kabupaten Banyuwangi	Rp	4,088,023,173,730.35
39	Kabupaten Nganjuk	Rp	3,068,642,314,643.17
40	Kabupaten Sitibondo	Rp	3,372,884,332,942.08
41	Kabupaten Tulungagung	Rp	3,385,084,017,181.58



TEMUAN AUDIT BPK 2017

NO	NAMA DAERAH	SIP	KEP	TOTAL
1	Kabupaten Pandeglang	6	7	13
2	Kabupaten Tangerang	4	3	7
3	Kota Cilegon	3	6	9
4	Kota Serang	7	5	12
5	Kota Tangerang	9	3	12
6	Kota Tangerang Selatan	7	6	13
7	DKI Jakarta	49	18	67
8	Kabupaten Bandung Barat	4	11	15
9	Kabupaten Bekasi	6	6	12
10	Kabupaten Bogor	7	12	19
11	Kabupaten Ciamis	8	5	13
12	Kabupaten Cianjur	14	5	19
13	Kabupaten Karawang	8	8	16
14	Kabupaten Majalengka	4	5	9
15	Kabupaten Purwakarta	17	13	30
16	Kabupaten Subang	10	5	15
17	Kota Bekasi	8	8	16
18	Kota Bogor	4	8	12
19	Kabupaten Bannyumas	8	6	14
20	Kabupaten Batang	11	5	16

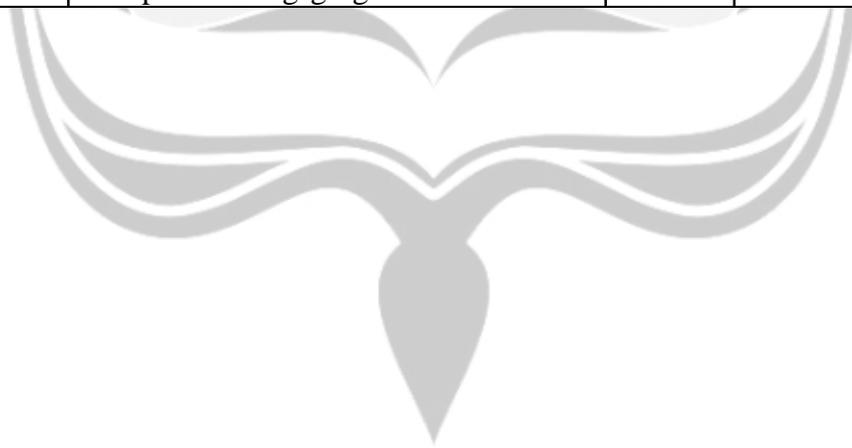
21	Kabupaten Brebes	8	5	13
22	Kabupaten Cilacap	12	7	19
23	Kabupaten Kendal	9	12	21
24	Kabupaten Klaten	6	7	13
25	Kabupaten Magelang	10	4	14
26	Kabupaten Pemasang	11	7	18
27	Kabupaten Purbalingga	9	11	20
28	Kabupaten Purworejo	5	8	13
29	Kabupaten Semarang	9	8	17
30	Kabupaten Sukoharjo	10	9	19
31	Kabupaten Tegal	8	7	15
32	Kabupaten Temanggung	5	3	8
33	Kota Salatiga	9	9	18
34	Kota Tegal	7	7	14
35	Kabupaten Bantul	8	3	11
36	Kabupaten Gunungkidul	6	2	8
37	Kota Yogyakarta	6	4	10
38	Kabupaten Banyuwangi	4	10	14
39	Kabupaten Nganjuk	5	10	15
40	Kabupaten Sitibondo	6	4	10
41	Kabupaten Tulungagung	7	5	12



OPINI AUDIT BPK 2017

NO	NAMA DAERAH	OPINI	SKALA
1	Kabupaten Pandeglang	WTP	5
2	Kabupaten Tangerang	WTP	5
3	Kota Cilegon	WTP	5
4	Kota Serang	WTP	5
5	Kota Tangerang	WTP	5
6	Kota Tangerang Selatan	WTP	5
7	DKI Jakarta	WTP	5
8	Kabupaten Bandung Barat	WDP	3
9	Kabupaten Bekasi	WTP	5
10	Kabupaten Bogor	WTP	5
11	Kabupaten Ciamis	WTP	5
12	Kabupaten Cianjur	WTP	5
13	Kabupaten Karawang	WTP	5
14	Kabupaten Majalengka	WTP	5
15	Kabupaten Purwakarta	WTP	5
16	Kabupaten Subang	WDP	3
17	Kota Bekasi	WTP	5
18	Kota Bogor	WTP	5
19	Kabupaten Banyumas	WTP	5
20	Kabupaten Batang	WTP	5

21	Kabupaten Brebes	WDP	3
22	Kabupaten Cilacap	WTP	5
23	Kabupaten Kendal	WTP	5
24	Kabupaten Klaten	WDP	3
25	Kabupaten Magelang	WTP	5
26	Kabupaten Pemalang	WTP	5
27	Kabupaten Purbalingga	WTP	5
28	Kabupaten Purworejo	WTP	5
29	Kabupaten Semarang	WTP	5
30	Kabupaten Sukoharjo	WTP	5
31	Kabupaten Tegal	WTP	5
32	Kabupaten Temanggung	WTP	5
33	Kota Salatiga	WTP	5
34	Kota Tegal	WDP	3
35	Kabupaten Bantul	WTP	5
36	Kabupaten Gunungkidul	WDP	3
37	Kota Yogyakarta	WTP	5
38	Kabupaten Banyuwangi	WTP	5
39	Kabupaten Nganjuk	WTP	5
40	Kabupaten Sitibondo	WTP	5
41	Kabupaten Tulungagung	WTP	5



RASIO EFEKTIFITAS 2017

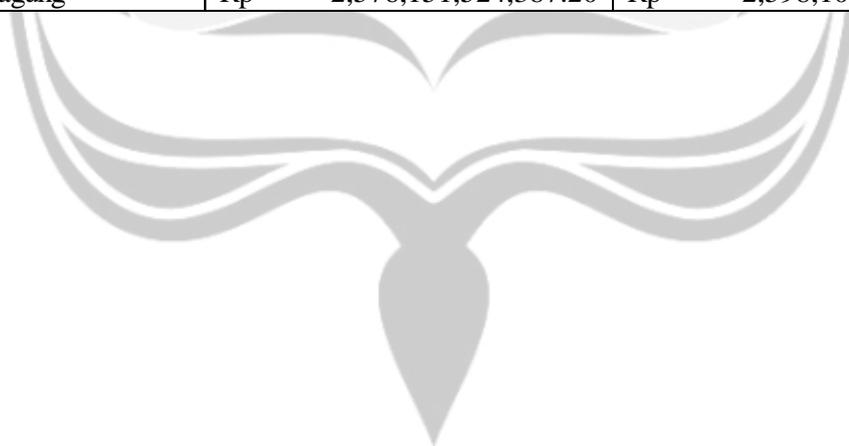
NO	NAMA DAERAH	REALISASI PAD	ANGGARAN PAD	RASIO EFEK.
1	Kabupaten Pandeglang	Rp 387,100,584,855.00	Rp 351,285,642,716.39	1.1020
2	Kabupaten Tangerang	Rp 2,786,647,279,878.00	Rp 2,181,164,749,861.00	1.2776
3	Kota Cilegon	Rp 652,084,326,149.00	Rp 763,970,990,417.00	0.8535
4	Kota Serang	Rp 232,458,208,409.00	Rp 214,818,694,729.00	1.0821
5	Kota Tangerang	Rp 1,991,898,969,395.00	Rp 1,659,256,959,534.00	1.2005
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 1,622,004,639,363.00	Rp 1,448,309,462,781.00	1.1199
7	DKI Jakarta	Rp 43,901,488,807,742.00	Rp 41,687,387,826,535.00	1.0531
8	Kabupaten Bandung Barat	Rp 609,916,387,808.09	Rp 523,102,522,332.00	1.1660
9	Kabupaten Bekasi	Rp 2,311,805,849,243.00	Rp 2,205,652,936,780.00	1.0481
10	Kabupaten Bogor	Rp 3,041,872,447,905.35	Rp 2,282,578,507,000.00	1.3326
11	Kabupaten Ciamis	Rp 223,076,019,908.56	Rp 214,380,145,047.00	1.0406
12	Kabupaten Cianjur	Rp 535,232,527,171.53	Rp 555,395,428,904.55	0.9637
13	Kabupaten Karawang	Rp 1,398,309,963,116.00	Rp 1,485,641,325,512.00	0.9412
14	Kabupaten Majalengka	Rp 513,783,824,021.55	Rp 566,985,599,363.94	0.9062
15	Kabupaten Purwakarta	Rp 472,480,560,976.00	Rp 834,016,041,732.00	0.5665
16	Kabupaten Subang	Rp 581,282,665,118.00	Rp 549,468,089,021.00	1.0579
17	Kota Bekasi	Rp 1,988,356,922,192.95	Rp 2,352,843,540,287.02	0.8451
18	Kota Bogor	Rp 978,197,741,947.33	Rp 917,788,606,450.00	1.0658
19	Kabupaten Bannyumas	Rp 619,701,627,380.00	Rp 571,033,167,996.00	1.0852
20	Kabupaten Batang	Rp 219,807,128,306.58	Rp 219,366,311,813.00	1.0020

21	Kabupaten Brebes	Rp 523,660,773,731.79	Rp 510,848,264,000.00	1.0251
22	Kabupaten Cilacap	Rp 648,091,381,095.69	Rp 612,077,977,866.00	1.0588
23	Kabupaten Kendal	Rp 404,978,613,972.00	Rp 395,818,878,534.00	1.0231
24	Kabupaten Klaten	Rp 371,718,439,306.04	Rp 335,512,441,000.00	1.1079
25	Kabupaten Magelang	Rp 403,561,238,310.00	Rp 399,425,826,000.00	1.0104
26	Kabupaten Pemalang	Rp 425,893,266,850.00	Rp 405,333,931,000.00	1.0507
27	Kabupaten Purbalingga	Rp 355,859,003,583.00	Rp 347,907,007,000.00	1.0229
28	Kabupaten Purworejo	Rp 298,606,494,653.00	Rp 269,067,899,709.60	1.1098
29	Kabupaten Semarang	Rp 417,417,848,830.80	Rp 363,698,928,000.00	1.1477
30	Kabupaten Sukoharjo	Rp 464,567,409,857.00	Rp 391,127,036,000.00	1.1878
31	Kabupaten Tegal	Rp 375,531,165,351.20	Rp 370,098,012,000.00	1.0147
32	Kabupaten Temanggung	Rp 308,466,748,340.00	Rp 307,083,335,256.00	1.0045
33	Kota Salatiga	Rp 220,243,361,132.00	Rp 188,391,649,000.00	1.1691
34	Kota Tegal	Rp 306,830,656,134.99	Rp 310,927,508,000.00	0.9868
35	Kabupaten Bantul	Rp 494,179,068,471.97	Rp 458,042,255,770.19	1.0789
36	Kabupaten Gunungkidul	Rp 271,370,043,388.71	Rp 263,462,293,704.14	1.0300
37	Kota Yogyakarta	Rp 657,049,376,703.22	Rp 557,709,068,666.00	1.1781
38	Kabupaten Banyuwangi	Rp 388,943,532,860.79	Rp 460,001,533,716.00	0.8455
39	Kabupaten Nganjuk	Rp 332,495,541,853.18	Rp 328,556,448,594.28	1.0120
40	Kabupaten Sitibondo	Rp 228,523,663,374.13	Rp 212,129,183,762.60	1.0773
41	Kabupaten Tulungagung	Rp 503,103,394,882.52	Rp 432,239,324,263.00	1.1639

RASIO EFISIENSI 2017

1	Kabupaten Pandeglang	Rp 2,330,037,181,538.43	Rp 2,465,844,714,731.00	0.9449
2	Kabupaten Tangerang	Rp 4,981,819,063,633.00	Rp 5,313,000,578,276.00	0.9377
3	Kota Cilegon	Rp 1,666,973,896,339.82	Rp 1,708,838,034,694.00	0.9755
4	Kota Serang	Rp 1,330,488,751,791.00	Rp 1,231,344,645,550.00	1.0805
5	Kota Tangerang	Rp 3,896,051,044,375.78	Rp 3,930,164,161,844.00	0.9913
6	Kota Tangerang Selatan	Rp 2,967,633,308,554.00	Rp 3,000,278,801,133.00	0.9891
7	DKI Jakarta	Rp 51,066,081,379,887.00	Rp 64,823,887,369,819.00	0.7878
8	Kabupaten Bandung Barat	Rp 2,581,919,106,515.27	Rp 2,722,712,944,566.09	0.9483
9	Kabupaten Bekasi	Rp 4,846,112,354,121.00	Rp 4,992,469,141,323.00	0.9707
10	Kabupaten Bogor	Rp 6,875,742,319,986.00	Rp 6,975,053,078,040.35	0.9858
11	Kabupaten Ciamis	Rp 2,526,057,464,021.00	Rp 2,582,166,044,869.56	0.9783
12	Kabupaten Cianjur	Rp 3,664,119,182,170.00	Rp 3,764,267,630,006.53	0.9734
13	Kabupaten Karawang	Rp 4,146,864,586,125.00	Rp 4,144,829,706,439.00	1.0005
14	Kabupaten Majalengka	Rp 2,638,825,946,023.00	Rp 2,685,374,288,724.55	0.9827
15	Kabupaten Purwakarta	Rp 2,023,895,829,777.00	Rp 2,151,598,579,948.00	0.9406
16	Kabupaten Subang	Rp 2,954,073,542,973.10	Rp 2,863,712,688,880.00	1.0316
17	Kota Bekasi	Rp 4,982,355,340,794.00	Rp 4,756,703,208,558.95	1.0474
18	Kota Bogor	Rp 2,245,590,002,913.62	Rp 2,289,359,362,675.33	0.9809
19	Kabupaten Banyumas	Rp 3,200,686,516,259.00	Rp 3,221,258,052,894.00	0.9936
20	Kabupaten Batang	Rp 1,563,181,721,380.96	Rp 1,566,154,720,813.58	0.9981

21	Kabupaten Brebes	Rp	2,767,377,461,021.38	Rp	2,856,934,060,543.79	0.9687
22	Kabupaten Cilacap	Rp	3,014,110,475,842.01	Rp	3,067,274,791,139.69	0.9827
23	Kabupaten Kendal	Rp	2,091,829,069,982.00	Rp	2,047,555,046,096.00	1.0216
24	Kabupaten Klaten	Rp	2,481,861,743,842.22	Rp	2,581,515,295,917.04	0.9614
25	Kabupaten Magelang	Rp	2,451,441,154,742.00	Rp	2,271,336,015,858.00	1.0793
26	Kabupaten Pemasang	Rp	2,258,339,872,920.00	Rp	2,353,030,274,957.00	0.9598
27	Kabupaten Purbalingga	Rp	2,013,766,011,409.00	Rp	1,957,994,897,247.00	1.0285
28	Kabupaten Purworejo	Rp	2,265,141,731,647.00	Rp	2,114,807,792,154.00	1.0711
29	Kabupaten Semarang	Rp	2,034,382,209,550.36	Rp	2,135,227,865,430.80	0.9528
30	Kabupaten Sukoharjo	Rp	1,887,503,285,006.00	Rp	2,055,571,033,667.00	0.9182
31	Kabupaten Tegal	Rp	2,453,004,538,262.00	Rp	2,450,766,552,130.20	1.0009
32	Kabupaten Temanggung	Rp	1,768,574,354,911.00	Rp	1,779,850,394,321.00	0.9937
33	Kota Salatiga	Rp	849,474,262,275.00	Rp	882,746,082,111.00	0.9623
34	Kota Tegal	Rp	1,017,223,991,907.51	Rp	1,024,765,938,276.99	0.9926
35	Kabupaten Bantul	Rp	2,076,742,163,062.60	Rp	2,086,878,989,570.45	0.9951
36	Kabupaten Gunungkidul	Rp	1,860,225,638,293.01	Rp	1,847,105,418,583.10	1.0071
37	Kota Yogyakarta	Rp	1,484,920,699,126.17	Rp	1,659,277,141,816.66	0.8949
38	Kabupaten Banyuwangi	Rp	2,776,030,217,673.20	Rp	2,732,022,666,956.37	1.0161
39	Kabupaten Nganjuk	Rp	2,218,770,813,887.94	Rp	2,299,759,167,913.45	0.9648
40	Kabupaten Sitibondo	Rp	1,611,319,203,889.22	Rp	1,620,456,354,002.13	0.9944
41	Kabupaten Tulungagung	Rp	2,576,151,524,387.20	Rp	2,598,104,487,656.52	0.9916



ANALISA DATA TAHUN 2018

NO	NAMA	TAHUN	LEVERAGE (X1)	UKURAN LEGISLATIF (X2)	IR (X3)	TOTAL ASET (X4)	TEMUAN AUDIT BPK (X5)	OPINI AUDIT BPK (X6)	RASIO EFEKTIVITAS (Y1)	RASIO EFISIENSI (Y2)
1	Kabupaten Tangerang	2018	0.0049	50	0.3208	Rp 14,356,043,519,847.20	9	5	1.1515	0.9377
2	Kota Cilegon	2018	0.0048	35	0.5164	Rp 4,520,506,103,109.00	7	5	0.7885	0.9755
3	Kota Serang	2018	0.0052	45	0.5920	Rp 2,530,799,809,879.08	12	5	1.0163	0.9883
4	Kota Tangerang	2018	0.0012	50	0.3378	Rp 7,844,681,532,354.14	12	5	1.5930	1.0797
5	Kota Tangerang Selatan	2018	0.0008	50	0.2769	Rp 20,358,502,058,443.60	10	5	1.0855	1.0188
6	DKI Jakarta	2018	0.0133	106	0.2916	Rp 492,902,439,208,040.00	22	5	0.9769	0.7878
7	Kabupaten Karawang	2018	0.0161	50	0.4892	Rp 4,832,949,592,660.40	23	5	0.8671	1.0298
8	Kabupaten Majalengka	2018	0.0267	50	0.5919	Rp 4,735,025,847,196.78	11	5	1.0056	0.9908
9	Kabupaten Purwakarta	2018	0.0483	45	0.5925	Rp 2,755,764,325,350.00	17	5	0.8912	0.9318
10	Kota Banjar	2018	0.0049	25	0.6314	Rp 1,646,583,795,408.99	16	5	0.8847	1.0049
11	Kota Bekasi	2018	0.0517	50	0.3420	Rp 11,707,468,561,698.70	18	5	0.8026	0.9828
12	Kota Depok	2018	0.0019	50	0.3998	Rp 10,190,832,640,978.70	15	5	1.0519	0.9536
13	Kabupaten Banyumas	2018	0.0075	50	0.5801	Rp 6,419,865,052,453.72	14	5	1.0278	1.0163
14	Kabupaten Batang	2018	0.0147	45	0.6162	Rp 2,511,746,350,765.55	17	5	1.0106	0.9914
15	Kabupaten Brebes	2018	0.0185	50	0.6142	Rp 3,366,883,430,103.06	16	3	0.9719	0.9900
16	Kabupaten Klaten	2018	0.0036	50	0.6409	Rp 4,001,324,130,418.45	17	5	1.0592	1.0128
17	Kabupaten Magelang	2018	0.0063	50	0.6073	Rp 3,141,760,777,818.53	12	5	0.8955	1.0801
18	Kabupaten Pekalongan	2018	0.0100	45	0.6130	Rp 2,763,481,985,690.29	12	5	0.8434	1.0282
19	Kabupaten Purbalingga	2018	0.0152	45	0.6367	Rp 2,621,915,743,198.10	14	5	1.0290	0.9879
20	Kabupaten Purworejo	2018	0.0083	45	0.6086	Rp 2,772,960,299,931.43	9	5	1.0287	1.0371
21	Kabupaten Semarang	2018	0.0062	45	0.6175	Rp 4,381,254,462,290.56	4	5	1.0285	1.0257
22	Kabupaten Sukoharjo	2018	0.0027	45	0.5934	Rp 4,738,164,776,817.01	8	5	1.2443	0.9974
23	Kabupaten Tegal	2018	0.0103	50	0.5994	Rp 3,184,190,479,588.44	12	5	0.8889	1.0203
24	Kabupaten Temanggung	2018	0.0173	45	0.6175	Rp 3,104,748,410,142.90	10	5	0.9637	0.9648
25	Kota Salatiga	2018	0.0079	25	0.6304	Rp 3,112,709,787,205.55	14	5	0.9960	1.0377
26	Kota Tegal	2018	0.0199	30	0.6104	Rp 2,402,980,382,890.01	8	5	0.9003	0.9286
27	Kabupaten Bantul	2018	0.0102	45	0.6084	Rp 3,255,020,103,752.85	8	5	1.0696	0.9721
28	Kabupaten Gunungkidul	2018	0.0064	45	0.6833	Rp 2,846,345,700,156.11	5	3	1.0441	0.9535
29	Kota Yogyakarta	2018	0.0043	40	0.4996	Rp 4,101,991,184,624.48	14	5	1.0873	0.9515
30	Kabupaten Bangkalan	2018	0.0209	50	0.6611	Rp 3,244,033,835,502.95	12	5	0.8847	1.0260
31	Kabupaten Bojonegoro	2018	0.0129	50	0.7908	Rp 8,316,744,707,903.99	14	5	1.1351	0.6396
32	Kabupaten Bondowoso	2018	0.0043	45	0.6377	Rp 2,800,580,769,222.10	9	5	1.0587	0.9604
33	Kabupaten Jember	2018	0.0271	50	0.6541	Rp 4,751,833,055,650.47	16	3	0.9806	0.9613
34	Kabupaten Lumajang	2018	0.0128	50	0.6695	Rp 2,385,355,101,451.39	10	5	0.9564	1.0111
35	Kabupaten Magetan	2018	0.0048	45	0.7000	Rp 2,047,654,642,691.95	8	5	1.1489	0.9384
36	Kabupaten Malang	2018	0.0060	50	0.6310	Rp 6,968,023,910,763.55	10	5	1.0938	0.9540
37	Kabupaten Mojokerto	2018	0.0054	50	0.5862	Rp 5,701,435,154,417.86	12	5	1.1310	0.9757
38	Kabupaten Nganjuk	2018	0.0096	45	0.6455	Rp 3,211,117,819,593.41	11	5	1.0477	0.9760
39	Kabupaten Pacitan	2018	0.0022	40	0.6544	Rp 2,269,926,446,324.97	15	5	1.1211	0.8923
40	Kabupaten Pamekasan	2018	0.0039	45	0.6802	Rp 3,483,606,764,607.15	12	5	1.2358	0.9339
41	Kabupaten Ponorogo	2018	0.0034	45	0.6747	Rp 2,840,526,918,332.65	8	5	1.1161	0.9608
42	Kabupaten Sampang	2018	0.0047	45	0.7140	Rp 3,377,609,585,570.47	15	5	0.9778	0.9944
43	Kabupaten Sidoarjo	2018	0.0042	50	0.4140	Rp 17,377,441,188,340.10	14	5	1.1285	0.9668
44	Kabupaten Situbondo	2018	0.0041	45	0.6993	Rp 3,520,994,088,931.26	16	5	1.0505	0.9857
45	Kabupaten Trenggalek	2018	0.0058	45	0.7005	Rp 2,346,933,275,438.45	10	5	1.0616	0.9573
46	Kota Mojokerto	2018	0.0120	25	0.6232	Rp 1,854,530,373,707.83	8	5	0.8948	0.9105

LEVERAGE 2018

NO	NAMA DAERAH	DEBT	EQUITY	LEVERAGE
1	Kabupaten Tangerang	Rp 69,990,976,143.68	Rp 14,286,052,543,703.60	0.0049
2	Kota Cilegon	Rp 21,417,730,223.00	Rp 4,499,088,372,886.00	0.0048
3	Kota Serang	Rp 13,021,930,295.00	Rp 2,517,777,879,584.08	0.0052
4	Kota Tangerang	Rp 9,451,742,859.15	Rp 7,835,229,789,495.03	0.0012
5	Kota Tangerang Selatan	Rp 17,136,025,837.72	Rp 20,341,366,032,605.90	0.0008
6	DKI Jakarta	Rp 6,458,589,188,882.00	Rp 486,443,850,019,158.00	0.0133
7	Kabupaten Karawang	Rp 76,564,794,368.16	Rp 4,756,384,798,292.20	0.0161
8	Kabupaten Majalengka	Rp 123,176,289,629.40	Rp 4,611,849,557,567.30	0.0267
9	Kabupaten Purwakarta	Rp 126,908,825,022.00	Rp 2,628,855,500,328.00	0.0483
10	Kota Banjar	Rp 7,953,055,875.28	Rp 1,638,630,739,533.74	0.0049
11	Kota Bekasi	Rp 575,893,472,947.73	Rp 11,131,575,088,751.00	0.0517
12	Kota Depok	Rp 19,609,313,040.81	Rp 10,171,223,327,937.80	0.0019
13	Kabupaten Banyumas	Rp 47,584,450,428.00	Rp 6,372,280,602,025.72	0.0075
14	Kabupaten Batang	Rp 36,377,284,647.20	Rp 2,475,369,066,118.35	0.0147
15	Kabupaten Brebes	Rp 61,148,270,093.55	Rp 3,305,735,160,009.51	0.0185
16	Kabupaten Klaten	Rp 14,184,935,215.78	Rp 3,987,139,195,202.67	0.0036
17	Kabupaten Magelang	Rp 19,717,148,141.04	Rp 3,122,043,629,677.49	0.0063
18	Kabupaten Pekalongan	Rp 27,308,927,798.84	Rp 2,736,173,057,891.44	0.0100
19	Kabupaten Purbalingga	Rp 39,259,348,356.60	Rp 2,582,656,394,841.50	0.0152
20	Kabupaten Purworejo	Rp 22,869,355,629.92	Rp 2,750,090,944,301.50	0.0083
21	Kabupaten Semarang	Rp 27,090,182,656.32	Rp 4,354,164,279,634.24	0.0062
22	Kabupaten Sukoharjo	Rp 12,842,782,453.39	Rp 4,725,321,994,363.60	0.0027

23	Kabupaten Tegal	Rp 32,495,011,851.00	Rp 3,151,695,467,737.44	0.0103
24	Kabupaten Temanggung	Rp 52,839,051,280.53	Rp 3,051,909,358,862.36	0.0173
25	Kota Salatiga	Rp 24,337,998,030.67	Rp 3,088,371,789,174.88	0.0079
26	Kota Tegal	Rp 46,855,414,772.64	Rp 2,356,124,968,117.40	0.0199
27	Kabupaten Bantul	Rp 32,990,815,170.10	Rp 3,222,029,288,582.75	0.0102
28	Kabupaten Gunungkidul	Rp 17,964,073,548.55	Rp 2,828,381,626,607.56	0.0064
29	Kota Yogyakarta	Rp 17,581,629,867.31	Rp 4,084,409,554,757.17	0.0043
30	Kabupaten Bangkalan	Rp 66,473,922,920.10	Rp 3,177,559,912,582.85	0.0209
31	Kabupaten Bojonegoro	Rp 106,002,499,299.35	Rp 8,210,742,208,604.64	0.0129
32	Kabupaten Bondowoso	Rp 11,928,240,057.18	Rp 2,788,652,529,165.00	0.0043
33	Kabupaten Jember	Rp 125,223,266,800.60	Rp 4,626,609,788,849.87	0.0271
34	Kabupaten Lumajang	Rp 30,134,238,578.00	Rp 2,355,220,862,873.40	0.0128
35	Kabupaten Magetan	Rp 9,861,709,149.74	Rp 2,037,792,933,542.20	0.0048
36	Kabupaten Malang	Rp 41,830,914,907.67	Rp 6,926,192,995,855.88	0.0060
37	Kabupaten Mojokerto	Rp 30,550,552,802.92	Rp 5,670,884,601,614.94	0.0054
38	Kabupaten Nganjuk	Rp 30,672,405,936.36	Rp 3,180,445,413,657.05	0.0096
39	Kabupaten Pacitan	Rp 5,040,375,758.88	Rp 2,264,886,070,566.09	0.0022
40	Kabupaten Pamekasan	Rp 13,669,362,419.27	Rp 3,469,937,402,187.88	0.0039
41	Kabupaten Ponorogo	Rp 9,558,886,398.58	Rp 2,830,968,031,934.07	0.0034
42	Kabupaten Sampang	Rp 15,782,236,992.91	Rp 3,361,827,348,577.18	0.0047
43	Kabupaten Sidoarjo	Rp 73,148,175,290.90	Rp 17,304,293,013,049.10	0.0042
44	Kabupaten Sitibondo	Rp 14,443,687,274.50	Rp 3,506,550,401,656.77	0.0041
45	Kabupaten Trenggalek	Rp 13,431,132,152.42	Rp 2,333,502,143,286.00	0.0058
46	Kota Mojokerto	Rp 21,977,364,887.81	Rp 1,832,553,008,820.02	0.0120



UKURAN LEGISLATIF 2018

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH ANGGOTA DPRD
1	Kabupaten Tangerang	50
2	Kota Cilegon	35
3	Kota Serang	45
4	Kota Tangerang	50
5	Kota Tangerang Selatan	50
6	DKI Jakarta	106
7	Kabupaten Karawang	50
8	Kabupaten Majalengka	50
9	Kabupaten Purwakarta	45
10	Kota Banjar	25
11	Kota Bekasi	50
12	Kota Depok	50
13	Kabupaten Banyumas	50
14	Kabupaten Batang	45
15	Kabupaten Brebes	50
16	Kabupaten Klaten	50
17	Kabupaten Magelang	50
18	Kabupaten Pekalongan	45
19	Kabupaten Purbalingga	45
20	Kabupaten Purworejo	45
21	Kabupaten Semarang	45
22	Kabupaten Sukoharjo	45
23	Kabupaten Tegal	50

24	Kabupaten Temanggung	45
25	Kota Salatiga	25
26	Kota Tegal	30
27	Kabupaten Bantul	45
28	Kabupaten Gunungkidul	45
29	Kota Yogyakarta	40
30	Kabupaten Bangkalan	50
31	Kabupaten Bojonegoro	50
32	Kabupaten Bondowoso	45
33	Kabupaten Jember	50
34	Kabupaten Lumajang	50
35	Kabupaten Magetan	45
36	Kabupaten Malang	50
37	Kabupaten Mojokerto	50
38	Kabupaten Nganjuk	45
39	Kabupaten Pacitan	40
40	Kabupaten Pamekasan	45
41	Kabupaten Ponorogo	45
42	Kabupaten Sampang	45
43	Kabupaten Sidoarjo	50
44	Kabupaten Sitibondo	45
45	Kabupaten Trenggalek	45
46	Kota Mojokerto	25

INTERGOVERNMENTAL REVENUE 2018

NO	NAMA DAERAH	DANA PERIMBANGAN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	INTERGOVERNMENTAL REVENUE
1	Kabupaten Tangerang	Rp 1,758,969,673,001.00	Rp 5,483,110,413,991.00	0.3208
2	Kota Cilegon	Rp 841,804,102,872.00	Rp 1,630,020,299,070.00	0.5164
3	Kota Serang	Rp 735,561,644,568.00	Rp 1,242,437,572,372.00	0.5920
4	Kota Tangerang	Rp 1,341,676,525,655.00	Rp 3,971,571,451,402.00	0.3378
5	Kota Tangerang Selatan	Rp 889,139,727,314.00	Rp 3,211,105,498,451.00	0.2769
6	DKI Jakarta	Rp 17,855,177,072,924.00	Rp 61,235,824,747,633.00	0.2916
7	Kabupaten Karawang	Rp 2,048,785,689,308.00	Rp 4,188,371,977,756.82	0.4892
8	Kabupaten Majalengka	Rp 1,668,010,124,763.00	Rp 2,817,970,771,089.60	0.5919
9	Kabupaten Purwakarta	Rp 1,220,987,188,561.00	Rp 2,060,667,874,221.00	0.5925
10	Kota Banjar	Rp 505,143,731,566.00	Rp 800,031,211,804.00	0.6314
11	Kota Bekasi	Rp 1,653,956,944,914.00	Rp 4,835,980,257,174.21	0.3420
12	Kota Depok	Rp 1,158,659,583,597.00	Rp 2,898,392,780,078.72	0.3998
13	Kabupaten Banyumas	Rp 1,894,413,016,142.00	Rp 3,265,926,651,860.83	0.5801
14	Kabupaten Batang	Rp 1,048,707,118,663.00	Rp 1,701,877,299,154.00	0.6162
15	Kabupaten Brebes	Rp 1,753,057,931,104.00	Rp 2,854,043,939,110.31	0.6142
16	Kabupaten Klaten	Rp 1,652,127,767,661.00	Rp 2,577,961,130,135.42	0.6409
17	Kabupaten Magelang	Rp 1,398,132,841,570.00	Rp 2,302,190,543,616.00	0.6073
18	Kabupaten Pekalongan	Rp 1,288,217,218,488.00	Rp 2,101,449,302,496.83	0.6130
19	Kabupaten Purbalingga	Rp 1,240,574,231,875.00	Rp 1,948,442,029,100.00	0.6367
20	Kabupaten Purworejo	Rp 1,247,436,685,096.00	Rp 2,049,784,186,054.00	0.6086
21	Kabupaten Semarang	Rp 1,307,508,472,787.00	Rp 2,117,416,566,803.60	0.6175
22	Kabupaten Sukoharjo	Rp 1,219,811,099,454.00	Rp 2,055,517,964,074.00	0.5934
23	Kabupaten Tegal	Rp 1,513,203,330,274.00	Rp 2,524,365,919,814.62	0.5994

24	Kabupaten Temanggung	Rp 1,069,110,356,426.00	Rp 1,731,235,867,161.00	0.6175
25	Kota Salatiga	Rp 561,012,927,696.00	Rp 889,992,411,250.00	0.6304
26	Kota Tegal	Rp 602,567,259,369.00	Rp 987,244,236,619.41	0.6104
27	Kabupaten Bantul	Rp 1,355,455,930,302.00	Rp 2,227,752,027,348.97	0.6084
28	Kabupaten Gunungkidul	Rp 1,264,791,667,120.00	Rp 1,850,894,408,120.73	0.6833
29	Kota Yogyakarta	Rp 867,706,455,745.00	Rp 1,736,919,997,852.52	0.4996
30	Kabupaten Bangkalan	Rp 1,344,825,042,010.00	Rp 2,034,156,539,451.02	0.6611
31	Kabupaten Bojonegoro	Rp 3,814,660,800,562.00	Rp 4,823,752,241,464.20	0.7908
32	Kabupaten Bondowoso	Rp 1,336,039,553,661.00	Rp 2,094,948,617,112.18	0.6377
33	Kabupaten Jember	Rp 2,347,407,698,706.00	Rp 3,588,873,174,515.37	0.6541
34	Kabupaten Lumajang	Rp 1,390,713,615,483.00	Rp 2,077,396,056,404.23	0.6695
35	Kabupaten Magetan	Rp 1,280,133,487,395.00	Rp 1,828,792,472,409.96	0.7000
36	Kabupaten Malang	Rp 2,413,067,750,143.00	Rp 3,824,390,785,364.99	0.6310
37	Kabupaten Mojokerto	Rp 1,427,268,109,599.00	Rp 2,434,620,262,423.15	0.5862
38	Kabupaten Nganjuk	Rp 1,529,562,444,177.00	Rp 2,369,549,960,797.12	0.6455
39	Kabupaten Pacitan	Rp 1,170,405,463,618.00	Rp 1,788,495,524,090.47	0.6544
40	Kabupaten Pamekasan	Rp 1,252,406,756,553.00	Rp 1,841,101,038,915.09	0.6802
41	Kabupaten Ponorogo	Rp 1,552,016,044,423.00	Rp 2,300,334,167,916.11	0.6747
42	Kabupaten Sampang	Rp 1,212,116,500,870.00	Rp 1,697,685,706,523.24	0.7140
43	Kabupaten Sidoarjo	Rp 1,793,474,341,790.00	Rp 4,332,577,984,768.01	0.4140
44	Kabupaten Situbondo	Rp 1,227,769,851,587.00	Rp 1,755,587,299,205.04	0.6993
45	Kabupaten Trenggalek	Rp 1,277,893,727,422.00	Rp 1,824,359,680,510.27	0.7005
46	Kota Mojokerto	Rp 553,125,341,841.00	Rp 887,592,875,412.26	0.6232



UKURAN PEMERINTAH DAERAH 2018

NO	NAMA DAERAH	TOTAL ASET
1	Kabupaten Tangerang	Rp 14,356,043,519,847.20
2	Kota Cilegon	Rp 4,520,506,103,109.00
3	Kota Serang	Rp 2,530,799,809,879.08
4	Kota Tangerang	Rp 7,844,681,532,354.14
5	Kota Tangerang Selatan	Rp 20,358,502,058,443.60
6	DKI Jakarta	Rp 492,902,439,208,040.00
7	Kabupaten Karawang	Rp 4,832,949,592,660.40
8	Kabupaten Majalengka	Rp 4,735,025,847,196.78
9	Kabupaten Purwakarta	Rp 2,755,764,325,350.00
10	Kota Banjar	Rp 1,646,583,795,408.99
11	Kota Bekasi	Rp 11,707,468,561,698.70
12	Kota Depok	Rp 10,190,832,640,978.70
13	Kabupaten Bannyumas	Rp 6,419,865,052,453.72
14	Kabupaten Batang	Rp 2,511,746,350,765.55
15	Kabupaten Brebes	Rp 3,366,883,430,103.06
16	Kabupaten Klaten	Rp 4,001,324,130,418.45
17	Kabupaten Magelang	Rp 3,141,760,777,818.53
18	Kabupaten Pekalongan	Rp 2,763,481,985,690.29
19	Kabupaten Purbalingga	Rp 2,621,915,743,198.10
20	Kabupaten Purworejo	Rp 2,772,960,299,931.43
21	Kabupaten Semarang	Rp 4,381,254,462,290.56
22	Kabupaten Sukoharjo	Rp 4,738,164,776,817.01
23	Kabupaten Tegal	Rp 3,184,190,479,588.44

24	Kabupaten Temanggung	Rp 3,104,748,410,142.90
25	Kota Salatiga	Rp 3,112,709,787,205.55
26	Kota Tegal	Rp 2,402,980,382,890.01
27	Kabupaten Bantul	Rp 3,255,020,103,752.85
28	Kabupaten Gunungkidul	Rp 2,846,345,700,156.11
29	Kota Yogyakarta	Rp 4,101,991,184,624.48
30	Kabupaten Bangkalan	Rp 3,244,033,835,502.95
31	Kabupaten Bojonegoro	Rp 8,316,744,707,903.99
32	Kabupaten Bondowoso	Rp 2,800,580,769,222.10
33	Kabupaten Jember	Rp 4,751,833,055,650.47
34	Kabupaten Lumajang	Rp 2,385,355,101,451.39
35	Kabupaten Magetan	Rp 2,047,654,642,691.95
36	Kabupaten Malang	Rp 6,968,023,910,763.55
37	Kabupaten Mojokerto	Rp 5,701,435,154,417.86
38	Kabupaten Nganjuk	Rp 3,211,117,819,593.41
39	Kabupaten Pacitan	Rp 2,269,926,446,324.97
40	Kabupaten Pamekasan	Rp 3,483,606,764,607.15
41	Kabupaten Ponorogo	Rp 2,840,526,918,332.65
42	Kabupaten Sampang	Rp 3,377,609,585,570.47
43	Kabupaten Sidoarjo	Rp 17,377,441,188,340.10
44	Kabupaten Sitibondo	Rp 3,520,994,088,931.26
45	Kabupaten Trenggalek	Rp 2,346,933,275,438.45
46	Kota Mojokerto	Rp 1,854,530,373,707.83

TEMUAN AUDIT BPK 2018

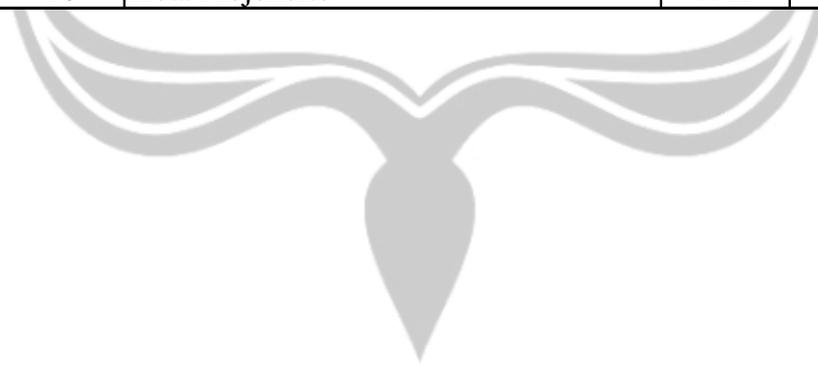
NO	NAMA DAERAH	SIP	KEP	TOTAL
1	Kabupaten Tangerang	5	4	9
2	Kota Cilegon	2	5	7
3	Kota Serang	4	8	12
4	Kota Tangerang	4	8	12
5	Kota Tangerang Selatan	4	6	10
6	DKI Jakarta	45	19	64
7	Kabupaten Karawang	11	12	23
8	Kabupaten Majalengka	7	4	11
9	Kabupaten Purwakarta	8	9	17
10	Kota Banjar	11	5	16
11	Kota Bekasi	7	11	18
12	Kota Depok	5	10	15
13	Kabupaten Banyumas	7	7	14
14	Kabupaten Batang	12	5	17
15	Kabupaten Brebes	10	6	16
16	Kabupaten Klaten	9	8	17
17	Kabupaten Magelang	6	6	12
18	Kabupaten Pekalongan	7	5	12
19	Kabupaten Purbalingga	6	8	14
20	Kabupaten Purworejo	3	6	9
21	Kabupaten Semarang	3	1	4
22	Kabupaten Sukoharjo	6	2	8
23	Kabupaten Tegal	4	8	12

24	Kabupaten Temanggung	4	6	10
25	Kota Salatiga	11	3	14
26	Kota Tegal	5	3	8
27	Kabupaten Bantul	5	3	8
28	Kabupaten Gunungkidul	3	2	5
29	Kota Yogyakarta	8	6	14
30	Kabupaten Bangkalan	9	3	12
31	Kabupaten Bojonegoro	8	6	14
32	Kabupaten Bondowoso	4	5	9
33	Kabupaten Jember	8	8	16
34	Kabupaten Lumajang	5	5	10
35	Kabupaten Magetan	4	4	8
36	Kabupaten Malang	6	4	10
37	Kabupaten Mojokerto	9	3	12
38	Kabupaten Nganjuk	8	3	11
39	Kabupaten Pacitan	8	7	15
40	Kabupaten Pamekasan	8	4	12
41	Kabupaten Ponorogo	6	2	8
42	Kabupaten Sampang	7	8	15
43	Kabupaten Sidoarjo	7	7	14
44	Kabupaten Sitibondo	11	5	16
45	Kabupaten Trenggalek	4	6	10
46	Kota Mojokerto	4	4	8

OPINI AUDIT BPK 2018

NO	NAMA DAERAH	OPINI	SKALA
1	Kabupaten Tangerang	WTP	5
2	Kota Cilegon	WTP	5
3	Kota Serang	WTP	5
4	Kota Tangerang	WTP	5
5	Kota Tangerang Selatan	WTP	5
6	DKI Jakarta	WTP	5
7	Kabupaten Karawang	WTP	5
8	Kabupaten Majalengka	WTP	5
9	Kabupaten Purwakarta	WTP	5
10	Kota Banjar	WTP	5
11	Kota Bekasi	WTP	5
12	Kota Depok	WTP	5
13	Kabupaten Banyumas	WTP	5
14	Kabupaten Batang	WTP	5
15	Kabupaten Brebes	WDP	3
16	Kabupaten Klaten	WTP	5
17	Kabupaten Magelang	WTP	5
18	Kabupaten Pekalongan	WTP	5
19	Kabupaten Purbalingga	WTP	5
20	Kabupaten Purworejo	WTP	5
21	Kabupaten Semarang	WTP	5
22	Kabupaten Sukoharjo	WTP	5
23	Kabupaten Tegal	WTP	5

24	Kabupaten Temanggung	WTP	5
25	Kota Salatiga	WTP	5
26	Kota Tegal	WTP	5
27	Kabupaten Bantul	WTP	5
28	Kabupaten Gunungkidul	WDP	3
29	Kota Yogyakarta	WTP	5
30	Kabupaten Bangkalan	WTP	5
31	Kabupaten Bojonegoro	WTP	5
32	Kabupaten Bondowoso	WTP	5
33	Kabupaten Jember	WDP	3
34	Kabupaten Lumajang	WTP	5
35	Kabupaten Magetan	WTP	5
36	Kabupaten Malang	WTP	5
37	Kabupaten Mojokerto	WTP	5
38	Kabupaten Nganjuk	WTP	5
39	Kabupaten Pacitan	WTP	5
40	Kabupaten Pamekasan	WTP	5
41	Kabupaten Ponorogo	WTP	5
42	Kabupaten Sampang	WTP	5
43	Kabupaten Sidoarjo	WTP	5
44	Kabupaten Sitibondo	WTP	5
45	Kabupaten Trenggalek	WTP	5
46	Kota Mojokerto	WTP	5



RASIO EFEKTIVITAS 2018

1	Kabupaten Tangerang	Rp 2,872,568,512,687.00	Rp 2,494,578,526,844.00	1.1515
2	Kota Cilegon	Rp 578,335,620,416.00	Rp 733,418,732,423.00	0.7885
3	Kota Serang	Rp 164,218,548,654.00	Rp 161,589,133,197.00	1.0163
4	Kota Tangerang	Rp 1,864,385,584,947.00	Rp 1,170,362,495,379.00	1.5930
5	Kota Tangerang Selatan	Rp 1,621,710,653,274.00	Rp 1,494,034,264,514.00	1.0855
6	DKI Jakarta	Rp 43,327,136,602,811.00	Rp 44,350,077,858,844.00	0.9769
7	Kabupaten Karawang	Rp 1,169,569,261,195.82	Rp 1,348,776,707,379.00	0.8671
8	Kabupaten Majalengka	Rp 449,974,129,888.60	Rp 447,461,013,153.00	1.0056
9	Kabupaten Purwakarta	Rp 368,851,052,594.00	Rp 413,899,386,204.00	0.8912
10	Kota Banjar	Rp 116,167,055,635.00	Rp 131,300,513,353.00	0.8847
11	Kota Bekasi	Rp 2,001,150,459,494.21	Rp 2,493,212,141,337.00	0.8026
12	Kota Depok	Rp 1,059,700,280,693.72	Rp 1,007,434,833,378.00	1.0519
13	Kabupaten Banyumas	Rp 648,326,914,034.83	Rp 630,770,637,593.00	1.0278
14	Kabupaten Batang	Rp 237,547,973,048.00	Rp 235,062,509,725.00	1.0106
15	Kabupaten Brebes	Rp 346,907,972,510.31	Rp 356,931,221,000.00	0.9719
16	Kabupaten Klaten	Rp 395,884,244,135.42	Rp 373,770,433,500.00	1.0592
17	Kabupaten Magelang	Rp 325,089,093,092.00	Rp 363,038,862,200.00	0.8955
18	Kabupaten Pekalongan	Rp 311,288,143,681.83	Rp 369,095,235,409.00	0.8434
19	Kabupaten Purbalingga	Rp 282,679,019,517.00	Rp 274,721,620,000.00	1.0290
20	Kabupaten Purworejo	Rp 286,971,590,024.00	Rp 278,952,386,723.00	1.0287
21	Kabupaten Semarang	Rp 383,475,678,133.60	Rp 372,861,719,000.00	1.0285
22	Kabupaten Sukoharjo	Rp 433,485,481,219.00	Rp 348,388,683,000.00	1.2443
23	Kabupaten Tegal	Rp 372,282,676,054.62	Rp 418,830,489,000.00	0.8889



24	Kabupaten Temanggung	Rp 252,019,934,778.00	Rp 261,511,805,053.00	0.9637
25	Kota Salatiga	Rp 208,926,057,032.00	Rp 209,772,712,000.00	0.9960
26	Kota Tegal	Rp 275,021,448,594.41	Rp 305,484,446,000.00	0.9003
27	Kabupaten Bantul	Rp 462,653,956,229.75	Rp 432,545,767,309.00	1.0696
28	Kabupaten Gunungkidul	Rp 226,984,458,096.18	Rp 217,393,391,371.08	1.0441
29	Kota Yogyakarta	Rp 667,493,075,470.14	Rp 613,890,504,437.00	1.0873
30	Kabupaten Bangkalan	Rp 199,258,427,616.41	Rp 225,239,028,383.40	0.8847
31	Kabupaten Bojonegoro	Rp 425,167,970,431.02	Rp 374,561,070,778.81	1.1351
32	Kabupaten Bondowoso	Rp 203,239,207,718.18	Rp 191,969,726,243.71	1.0587
33	Kabupaten Jember	Rp 597,509,388,023.37	Rp 609,304,818,610.50	0.9806
34	Kabupaten Lumajang	Rp 270,169,877,126.81	Rp 282,484,709,562.30	0.9564
35	Kabupaten Magetan	Rp 196,826,063,935.96	Rp 171,321,160,004.00	1.1489
36	Kabupaten Malang	Rp 585,290,988,835.99	Rp 535,084,504,055.82	1.0938
37	Kabupaten Mojokerto	Rp 546,289,352,326.15	Rp 483,033,385,770.10	1.1310
38	Kabupaten Nganjuk	Rp 361,586,738,454.12	Rp 345,138,632,616.31	1.0477
39	Kabupaten Pacitan	Rp 185,153,427,758.47	Rp 165,159,478,089.00	1.1211
40	Kabupaten Pamekasan	Rp 222,410,664,049.09	Rp 179,974,568,986.00	1.2358
41	Kabupaten Ponorogo	Rp 289,017,741,958.47	Rp 258,942,963,965.67	1.1161
42	Kabupaten Sampang	Rp 135,349,867,961.19	Rp 138,417,402,149.26	0.9778
43	Kabupaten Sidoarjo	Rp 1,685,558,666,147.01	Rp 1,493,647,141,178.83	1.1285
44	Kabupaten Situbondo	Rp 187,287,219,449.41	Rp 178,279,865,796.90	1.0505
45	Kabupaten Trenggalek	Rp 233,808,792,639.21	Rp 220,244,865,465.47	1.0616
46	Kota Mojokerto	Rp 182,508,304,189.27	Rp 203,970,759,138.00	0.8948



RASIO EFISIENSI 2018

NO	NAMA DAERAH	TOT. REALISASI BELANJA DAERAH	TOT. REALISASI PENDAPATAN DAERAH	RASIO EFIS.
1	Kabupaten Tangerang	Rp 5,878,835,077,360.00	Rp 5,483,110,413,991.00	0.9377
2	Kota Cilegon	Rp 1,590,087,084,842.00	Rp 1,630,020,299,070.00	0.9755
3	Kota Serang	Rp 1,227,871,712,658.00	Rp 1,242,437,572,372.00	0.9883
4	Kota Tangerang	Rp 4,288,007,523,238.91	Rp 3,971,571,451,402.00	1.0797
5	Kota Tangerang Selatan	Rp 3,271,441,999,423.65	Rp 3,211,105,498,451.00	1.0188
6	DKI Jakarta	Rp 48,239,526,150,093.90	Rp 61,235,824,747,633.00	0.7878
7	Kabupaten Karawang	Rp 4,313,081,222,954.00	Rp 4,188,371,977,756.82	1.0298
8	Kabupaten Majalengka	Rp 2,791,917,486,735.00	Rp 2,817,970,771,089.60	0.9908
9	Kabupaten Purwakarta	Rp 1,920,109,639,035.00	Rp 2,060,667,874,221.00	0.9318
10	Kota Banjar	Rp 803,917,301,982.00	Rp 800,031,211,804.00	1.0049
11	Kota Bekasi	Rp 4,752,683,597,989.58	Rp 4,835,980,257,174.21	0.9828
12	Kota Depok	Rp 2,763,912,416,569.15	Rp 2,898,392,780,078.72	0.9536
13	Kabupaten Banyumas	Rp 3,319,060,759,043.00	Rp 3,265,926,651,860.83	1.0163
14	Kabupaten Batang	Rp 1,687,215,725,890.00	Rp 1,701,877,299,154.00	0.9914
15	Kabupaten Brebes	Rp 2,825,364,002,156.00	Rp 2,854,043,939,110.31	0.9900
16	Kabupaten Klaten	Rp 2,611,007,499,825.88	Rp 2,577,961,130,135.42	1.0128
17	Kabupaten Magelang	Rp 2,486,540,561,169.00	Rp 2,302,190,543,616.00	1.0801
18	Kabupaten Pekalongan	Rp 2,160,758,920,323.00	Rp 2,101,449,302,496.83	1.0282
19	Kabupaten Purbalingga	Rp 1,924,908,432,550.00	Rp 1,948,442,029,100.00	0.9879
20	Kabupaten Purworejo	Rp 2,125,880,839,764.00	Rp 2,049,784,186,054.00	1.0371
21	Kabupaten Semarang	Rp 2,171,799,810,993.60	Rp 2,117,416,566,803.60	1.0257
22	Kabupaten Sukoharjo	Rp 2,050,161,904,519.00	Rp 2,055,517,964,074.00	0.9974
23	Kabupaten Tegal	Rp 2,575,620,503,042.00	Rp 2,524,365,919,814.62	1.0203

24	Kabupaten Temanggung	Rp 1,670,309,285,608.00	Rp 1,731,235,867,161.00	0.9648
25	Kota Salatiga	Rp 923,538,238,485.00	Rp 889,992,411,250.00	1.0377
26	Kota Tegal	Rp 916,730,788,800.05	Rp 987,244,236,619.41	0.9286
27	Kabupaten Bantul	Rp 2,165,651,760,352.96	Rp 2,227,752,027,348.97	0.9721
28	Kabupaten Gunungkidul	Rp 1,764,858,204,307.65	Rp 1,850,894,408,120.73	0.9535
29	Kota Yogyakarta	Rp 1,652,727,843,523.91	Rp 1,736,919,997,852.52	0.9515
30	Kabupaten Bangkalan	Rp 2,087,071,413,379.24	Rp 2,034,156,539,451.02	1.0260
31	Kabupaten Bojonegoro	Rp 3,085,425,470,749.82	Rp 4,823,752,241,464.20	0.6396
32	Kabupaten Bondowoso	Rp 2,012,067,456,000.82	Rp 2,094,948,617,112.18	0.9604
33	Kabupaten Jember	Rp 3,450,097,455,531.72	Rp 3,588,873,174,515.37	0.9613
34	Kabupaten Lumajang	Rp 2,100,383,026,799.75	Rp 2,077,396,056,404.23	1.0111
35	Kabupaten Magetan	Rp 1,716,126,360,246.85	Rp 1,828,792,472,409.96	0.9384
36	Kabupaten Malang	Rp 3,648,517,932,310.84	Rp 3,824,390,785,364.99	0.9540
37	Kabupaten Mojokerto	Rp 2,375,393,418,428.07	Rp 2,434,620,262,423.15	0.9757
38	Kabupaten Nganjuk	Rp 2,312,797,118,680.45	Rp 2,369,549,960,797.12	0.9760
39	Kabupaten Pacitan	Rp 1,595,939,987,644.74	Rp 1,788,495,524,090.47	0.8923
40	Kabupaten Pamekasan	Rp 1,719,319,711,299.32	Rp 1,841,101,038,915.09	0.9339
41	Kabupaten Ponorogo	Rp 2,210,190,859,171.97	Rp 2,300,334,167,916.11	0.9608
42	Kabupaten Sampang	Rp 1,688,227,124,511.17	Rp 1,697,685,706,523.24	0.9944
43	Kabupaten Sidoarjo	Rp 4,188,537,810,911.10	Rp 4,332,577,984,768.01	0.9668
44	Kabupaten Situbondo	Rp 1,730,464,593,001.47	Rp 1,755,587,299,205.04	0.9857
45	Kabupaten Trenggalek	Rp 1,746,458,163,644.87	Rp 1,824,359,680,510.27	0.9573
46	Kota Mojokerto	Rp 808,163,334,616.20	Rp 887,592,875,412.26	0.9105

LAMPIRAN II

Statistik Deskriptif Y1 Sebelum Transformasi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage	126	.0002	.0723	.011399	.0132536
Ukuran Legislatif	126	25	106	46.97	11.314
Intergovernmental Revenue	126	.2769	.7908	.581058	.1210885
Ukuran Pemerintah Daerah	126	1,526,772,767,370.94	492,902,439,208,040	16,021,630,184,367.9	70,870,688,418,580.6
Temuan Audit	126	4	69	14.44	8.061
Opini Audit	126	3	5	4.75	.669
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y1)	126	.4342	1.5930	1.038109	.1275196
Valid N (listwise)	126				

Statistik Deskriptif Y1 Setelah Transformasi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Log_Leverage	126	-3.70	-1.14	-2.1583	.45508
Log_UkuranLegislatif	126	1.40	2.03	1.6614	.09414
Log_Intergovernmental Revenue	126	-.56	-.10	-.2476	.10787
Log_Ukuran Pemerintah Daerah	126	12.18	14.69	12.6620	.40058
Log_Temuan Audit BPK	126	.60	1.84	1.1221	.16689
Log_Opini Audit BPK	126	.48	.70	.6708	.07416
Log_Y2Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	126	-.36	.20	.0125	.06001
Valid N (listwise)	126				

Statistik Deskriptif Y2 Sebelum Transformasi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage	126	.0002	.0723	.011399	.0132536
Ukuran Legislatif	126	25	106	46.97	11.314
Intergovernmental Revenue	126	.2769	.7908	.581058	.1210885
Ukuran Pemerintah Daerah	126	1, 526, 772, 767, 370.94	492, 902, 439, 208, 040	16, 021, 630, 184, 367.9	70, 870, 688, 418, 580.6
Temuan Audit	126	4	69	14.44	8.061
Opini Audit	126	3	5	4.75	.669
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y2)	126	.6400	1.1267	.993355	.0635602
Valid N (listwise)	126				

Statistik Deskriptif Y2 Setelah Transformasi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Log_Leverage	126	-3.70	-1.14	-2.1583	.45508
Log_UkuranLegislatif	126	1.40	2.03	1.6614	.09414
Log_Intergovernmental Revenue	126	-.56	-.10	-.2476	.10787
Log_Ukuran Pemerintah Daerah	126	12.18	14.69	12.6620	.40058
Log_Temuan Audit BPK	126	.60	1.84	1.1221	.16689
Log_Opini Audit BPK	126	.48	.70	.6708	.07416
Log_Y2Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	126	-.19	.05	-.0039	.02988
Valid N (listwise)	126				

LAMPIRAN III

Tabel Hasil Uji Normalitas Y1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04938972
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.097
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		1.186
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120

Tabel Hasil Uji Normalitas Y2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02581327
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.078
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		.944
Asymp. Sig. (2-tailed)		.335

LAMPIRAN IV

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Log_Levearge	.870	1.150
Log_UkuranLegislatif	.459	2.179
Log_IntergovermentalRevenue	.329	3.039
Log_UkuranPemerintahDaerah	.205	4.869
Log_TemuanAuditBPK	.776	1.289
Log_OpiniAuditBPK	.893	1.120

LAMPIRAN V

Tabel Uji Heteroskedasitas Y1

Correlations			
			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Log_Levearge	Correlation Coefficient	.130
		Sig. (2-tailed)	.148
		N	126
	Log_UkuranLegislatif	Correlation Coefficient	-.033
		Sig. (2-tailed)	.713
		N	126
	Log_IntergovermentalRevenue	Correlation Coefficient	-.013
		Sig. (2-tailed)	.886
		N	126
	Log_UkuranPemerintahDaerah	Correlation Coefficient	.011
		Sig. (2-tailed)	.905
		N	126
	Log_TemuanAuditBPK	Correlation Coefficient	.114
		Sig. (2-tailed)	.205
		N	126
	Log_OpiniAuditBPK	Correlation Coefficient	-.020
		Sig. (2-tailed)	.827
		N	126
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.	
	N	126	

Tabel Hasil Uji Heteroskedasitas Y2

Correlations			
			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Log_Leverage	Correlation Coefficient	.050
		Sig. (2-tailed)	.576
		N	126
	Log_Ukuran Legislatif	Correlation Coefficient	.172
		Sig. (2-tailed)	.054
		N	126
	Log_Intergovernmental Revenue	Correlation Coefficient	.072
		Sig. (2-tailed)	.422
		N	126
	Log_Ukuran Pemerintah Daerah	Correlation Coefficient	.144
		Sig. (2-tailed)	.108
		N	126
	Log_Temuan Audit BPK	Correlation Coefficient	.045
		Sig. (2-tailed)	.619
		N	126
	Log_Opini Audit BPK	Correlation Coefficient	.006
		Sig. (2-tailed)	.948
		N	126
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	126

LAMPIRAN VI**Tabel Hasil Uji Autokorelasi Y1**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00644
Cases < Test Value	63
Cases >= Test Value	63
Total Cases	126
Number of Runs	63
Z	-.179
Asymp. Sig. (2-tailed)	.858

Tabel Hasil Uji Autokorelasi Y2**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00102
Cases < Test Value	63
Cases >= Test Value	63
Total Cases	126
Number of Runs	55
Z	-1.610
Asymp. Sig. (2-tailed)	.107

LAMPIRAN VII

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis Y1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.687	.247		-2.777	.006
Log_Levearge	-.070	.011	-.530	-6.545	.000
Log_UkuranLegislatif	.019	.071	.029	.264	.792
Log_IntergovernmentalRevenue	.169	.073	.304	2.314	.022
Log_UkuranPemerintahDaerah	.049	.025	.328	1.971	.051
Log_TemuanAuditBPK	-.075	.031	-.208	-2.424	.017
Log_OpiniAuditBPK	.031	.065	.039	.482	.630

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis Y2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.670	.129		5.180	.000
Log_Leverage	-.013	.006	-.198	-2.328	.022
Log_Ukuran Legislatif	.052	.037	.164	1.400	.164
Log_Intergovernmental Revenue	-.123	.038	-.443	-3.211	.002
Log_Ukuran Pemerintah Daerah	-.066	.013	-.883	-5.049	.000
Log_Temuan Audit BPK	.010	.016	.056	.621	.536
Log_Opini Audit BPK	.006	.034	.015	.179	.858

Tabel Hasil Uji Nilai T Y1

Model	t	Sig.
(Constant)	-2.777	.006
Log_Leverage	-6.545	.000
Log_UkuranLegislatif	.264	.792
Log_IntergovernmentalRevenue	2.314	.022
Log_UkuranPemerintahDaerah	1.971	.051
Log_TemuanAuditBPK	-2.424	.017
Log_OpiniAuditBPK	.482	.630

Tabel Hasil Uji Nilai T Y2

Model	t	Sig.
(Constant)	5.180	.000
Log_Leverage	-2.328	.022
Log_Ukuran Legislatif	1.400	.164
Log_Intergovernmental Revenue	-3.211	.002
Log_Ukuran Pemerintah Daerah	-5.049	.000
Log_Temuan Audit BPK	.621	.536
Log_Opini Audit BPK	.179	.858

Tabel Hasil Uji Nilai F Y1**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.145	6	.024	9.445	.000 ^a
	Residual	.305	119	.003		
	Total	.450	125			

Tabel Hasil Uji Nilai F Y2**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.028	6	.005	6.735	.000 ^a
	Residual	.083	119	.001		
	Total	.112	125			

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi Y1**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.568 ^a	.323	.288	.05062

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi Y2**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.503 ^a	.253	.216	.02646